



BAB 1 PENDAHULUAN

BAB I – PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dituntut untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, untuk itu diperlukan akuntabilitas publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraannya

Hal ini merupakan salah satu kriteria untuk instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang tertuang dalam Rencana Lima Tahun 2015-2019 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2019 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus sebagai alat kendali serta pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian dari instansi pemerintah wajib menyusun dan melaporkan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019.

I.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat pada Tahun 2019 membawahi 37 (tiga puluh tujuh) unit satuan pelayanan yang terdiri dari 20 (dua puluh) unit satuan pelayanan Terminal Tipe A (TTA) dan 17 (tujuh belas) unit satuan pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), yaitu :

No	Unit Kerja		
	Terminal Tipe A	No	UPPKB
1.	TTA Tirtonadi;	1.	UPPKB Selogiri;
2.	TTA Ir. Soekarno;	2.	UPPKB Toyogo;
3.	TTA Bobotsari;	3.	UPPKB Pringsurat;
4.	TTA Bangga Bangun Desa;	4.	UPPKB Salam;
5.	TTA Tingkir;	5.	UPPKB Gubug;
6.	TTA Pemalang;	6.	UPPKB Lebuawu;
7.	TTA Jati;	7.	UPPKB Sambong;
8.	TTA Dhaksinarga;	8.	UPPKB Ajibarang;
9.	TTA Pekalongan;	9.	UPPKB Kalitirto;
10.	TTA Kebumen;	10.	UPPKB Wanareja;
11.	TTA Giri Adi Pura;	11.	UPPKB Subah;
12.	TTA Tidar;	12.	UPPKB Kulwaru;
13.	TTA Mangkang;	13.	UPPKB Taman Martani;
14.	TTA Bawen;	14.	UPPKB Banyudono;
15.	TTA Cepu;	15.	UPPKB Klepu;
16.	TTA Mendolo;	16.	UPPKB Sarang;
17.	TTA Bulupitu;	17.	UPPKB Tanjung
18.	TTA Purworejo;		
19.	TTA Giwangan;		
20.	TTA Tegal;		

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sarana dan prasarana transportasi jalan, transportasi sungai danau dan penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan perintis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana, program dan anggaran;
2. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri;
3. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan orang antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan;
4. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial, dan pelabuhan perintis, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan perintis, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan perintis;
5. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat;
6. pelaksanaan evaluasi dan laporan.

Bagan struktur organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X
Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta



Gambar I. 1 Bagan Struktur Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Tugas dan tanggung jawab masing-masing seksi, subbagian, satuan pelaksana, dan kelompok jabatan adalah sebagai berikut :

a. Subbagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan rencana, program, dan anggaran, urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan.

b. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembangunan pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang tipe A, terminal barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri.

c. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional, pengawasan angkutan orang lintas batas negara dan/atau antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, dan angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan.

d. Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis

Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan penyeberangan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan, pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau dan penyeberangan,serta penyelenggara pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan perintis.

e. Satuan Pelayanan

Mempunyai tugas berdasarkan penugasan yang diberikan oleh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I.3. Sumber Daya Manusia

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta menaungi sebanyak 1530 Pegawai dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 108 Pegawai, terdiri dari 20 Terminal Tipe A dan 17 UPPKB.

No	Unit Kerja	
	Terminal Tipe A	Jumlah Pegawai
1.	TTA Tirtonadi;	213
2.	TTA Ir. Soekarno;	72
3.	TTA Bobotsari;	26
4.	TTA Bangga Bangun Desa;	46
5.	TTA Tingkir;	47
6.	TTA Pemalang;	67
7.	TTA Jati;	30
8.	TTA Dhaksinarga;	39
9.	TTA Pekalongan;	46
10.	TTA Kebumen;	45
11.	TTA Giri Adi Pura;	51
12.	TTA Tidar;	39
13.	TTA Mangkang;	47
14.	TTA Bawen;	44
15.	TTA Cepu;	22
16.	TTA Mendolo;	28
17.	TTA Bulupitu;	89
18.	TTA Purworejo;	36
19.	TTA Giwangan;	106
20.	TTA Tegal;	53

No	Unit Kerja	
	UPPKB	Jumlah Pegawai
1	UPPKB Selogiri;	1
2	UPPKB Toyogo;	1
3	UPPKB Pringsurat;	1
4	UPPKB Salam;	2
5	UPPKB Gubug;	3
6	UPPKB Lebuawu;	2
7	UPPKB Sambong;	1
8	UPPKB Ajibarang;	23
9	UPPKB Kalitirto;	20
10	UPPKB Wanareja;	20
11	UPPKB Subah;	39
12	UPPKB Kulwaru;	31
13	UPPKB Taman Martani;	23
14	UPPKB Banyudono;	24
15	UPPKB Klepu;	31
16	UPPKB Sarang;	39
17	UPPKB Tanjung	15

I.4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

1.4.1 Potensi

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur pembantu pimpinan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam rangka melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan kepada pemerintah daerah. Tugas dan fungsi dimaksud meliputi koordinasi kegiatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, pembinaan dan pemberian dukungan di bidang transportasi darat. Potensi pengembangan pada bidang transportasi darat adalah sebagai berikut:

- a. Dalam fenomena perkembangan globalisasi, tingkat pelayanan transportasi darat akan terus diupayakan untuk memenuhi standar nasional maupun internasional sehingga meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global;
- b. Teknologi transportasi darat akan berpengaruh terhadap kapasitas angkut, fleksibilitas pergerakan, kecepatan waktu tempuh, dan bentuk

- serta kehematannya dalam mengkonsumsi bahan bakar;
- c. Dengan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan melalui kebijakan deregulasi akan memungkinkan meningkatnya peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan dana investasi yang dibutuhkan bagi pembangunan infrastruktur transportasi darat, serta akan memperluas jangkauan;
 - d. Dengan melakukan program pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan maka akan meningkatkan citra Pemerintah Indonesia dalam dunia internasional dan meningkatkan citra bangsa. Pembangunan transportasi darat berkelanjutan dapat dilakukan secara konsisten, misalnya mewajibkan melakukan studi amdal sebelum masa konstruksi bagi setiap program pembangunan transportasi darat yang telah disetujui pendanaannya. Selanjutnya dilakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pasca operasi secara berkala oleh lembaga-lembaga yang telah ada. Pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah dapat disinergikan menjadi kekuatan yang efektif.

1.4.2 Isu Strategis

- a. Membangun Konektivitas Nasional untuk keseimbangan pembangunan infrastruktur penunjang konektivitas nasional baik berupa jaringan transportasi dan jaringan telekomunikasi, perlu diintegrasikan dengan pelayanan sarana intermoda transportasi yang terhubung secara efisien dan efektif, termasuk mendorong pembangunan konektivitas antar wilayah, sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Penyediaan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan logistik, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan mempercepat gerak ekonomi. Kebijakan strategis untuk mewujudkan

konektivitas nasional :

1. Mempercepat pembangunan sistem transportasi multimoda;
2. Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global;
3. Menjaga keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan;
4. Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi;
5. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan;
6. Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi;
7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pengembangan sumber daya manusia.

b. Membangun Transportasi Umum Massal Perkotaan

Pembangunan perkotaan Indonesia kedepan diarahkan pada peningkatan peran perkotaan sebagai basis pembangunan dan kehidupan yang layak huni, berkeadilan, mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan, sesuai dengan karakter potensi dan budaya lokal. Arah kebijakan pembangunan perkotaan berfokus pada pengembangan kota sebagai suatu kesatuan kawasan/wilayah, yaitu kota sebagai pendorong pertumbuhan nasional dan regional serta kota sebagai tempat tinggal yang berorientasi pada kebutuhan penduduk kota. Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan transportasi umum massal perkotaan, pembangunan

sistem angkutan umum modern yang saling terintegrasi seperti BRT dan MRT diharapkan dapat meningkatkan peran angkutan umum dalam melayani kebutuhan perjalanan penduduk perkotaan serta menciptakan transportasi perkotaan yang praktis, efisien, ramah lingkungan, dan berkeadaban. Arah kebijakan dan strategi yang disusun lima tahun ke depan adalah:

1. Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dengan orientasi kepada bus maupun rel serta dilengkapi dengan fasilitas alih moda terpadu;
2. Mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang dengan memperhatikan interaksi antara transportasi dan tata guna lahan;
3. Meningkatkan integrasi kelembagaan transportasi perkotaan.

1.4.3 Permasalahan

a. Permasalahan Transportasi Angkutan Jalan

1. Rendahnya kondisi pelayanan prasarana jalan akibat kerusakan di jalan, belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta pola pelayanan distribusi angkutan jalan, antarkota, perkotaan dan pedesaan.
2. Masih tingginya kerusakan jalan akibat pelanggaran muatan lebih di jalan yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi akibat dari:
 - a) Pengawasan melalui Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) belum semua optimal dikarenakan belum semua UPPKB beroperasi;
 - b) Masih tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan akibat: disiplin pengguna jalan, rendahnya tingkat kelaikan armada; rambu dan fasilitas keselamatan di jalan; law enforcement peraturan lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas;
 - c) Masalah mobilitas, terutama rendahnya kelancaran distribusi angkutan jalan, akibat:
 - 1) Terbatasnya perkembangan kapasitas prasarana jalan

- dibandingkan dengan perkembangan armada di jalan;
- 2) Optimalisasi penggunaan kapasitas jalan yang masih rendah, serta banyaknya daerah rawan kemacetan akibat penggunaan badan dan daerah milik jalan untuk kegiatan sosial ekonomi, pasar, parkir, dsb.
- d) Masalah keterjangkauan dan pemerataan pelayanan transportasi jalan; banyaknya pungutan dan retribusi di jalan yang membuat biaya angkut di jalan belum efisien;
 - e) Masalah peraturan dan kelembagaan, terutama:
 - 1) Belum terpadunya tatanan transportasi nasional dan wilayah;
 - 2) Masalah pendidikan dan law enforcement peraturan yang belum efektif dilihat dari tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas di jalan. Pelanggaran lalu lintas dibedakan menjadi pelanggaran muatan dan/atau dimensi, pelanggaran perijinan angkutan orang dan/atau barang, pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran kelengkapan dokumen, pelanggaran rambu. Masalah disiplin berlalu lintas juga merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas;
 - 3) Masih terbatasnya pengembangan SDM di bidang LLAJ baik di tingkat regulator maupun operator, pembinaan usaha angkutan serta pengembangan teknologi sarana dan prasarana LLAJ yang lebih efisien dan ramah lingkungan;
 - 4) Masih tingginya dampak lingkungan (polusi udara dan suara) akibat kemacetan dan masih dominannya penggunaan lalu lintas kendaraan pribadi di jalan, terutama di wilayah perkotaan. Rendahnya kualitas dan kuantitas angkutan umum terutama transportasi perkotaan akibat belum berkembangnya keterpaduan rencana tata ruang dan transportasi perkotaan, kesadaran dan kemampuan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan transportasi, rendahnya disiplin masyarakat pengguna, profesionalisme aparat dan operator transportasi, tingginya

tingkat kemacetan lalu lintas pada jam sibuk, serta rendahnya kualitas pelayanan transportasi umum.

b. Permasalahan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

1. Belum ada data yang lengkap mengenai peta alur pelayaran sungai danau;
2. Belum tersusun data sarana prasarana transportasi penyeberangan;
3. Terbatasnya jumlah SDM sehingga pelaksanaan Monitoring dan Pengumpulan Data Transportasi SDP di daerah kurang optimal;
4. Belum dilaksanakan penetapan kelas alur-pelayaran sungai dan danau sebagai batas wilayah administrasi serta pembagian kewenangan antara Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota;
5. Belum ada buku petunjuk-pelayaran di sungai dan danau.

c. Permasalahan Transportasi Perkotaan

1. Kurangnya panduan tentang penyelenggaraan transportasi perkotaan;
2. Kurangnya pemahaman terhadap penyelenggaraan transportasi perkotaan;
3. Kurang jelasnya kewenangan penanganan masalah transportasi perkotaan khususnya pada kawasan aglomerasi;
4. Masih belum terintegrasinya perencanaan tata ruang dengan transportasi;
5. Kemacetan lalu lintas;
6. Pelayanan angkutan umum belum memadai;
7. Pencemaran udara akibat kendaraan bermotor.

d. Permasalahan Keselamatan Transportasi Darat

1. Ada dua hal yang dihadapi di dalam bidang transportasi, yaitu kemacetan dan keselamatan. Kemacetan terjadi di kota-kota besar di Indonesia, sedangkan kecelakaan terjadi hampir di semua wilayah Indonesia;
2. Kurangnya koordinasi dengan instansi lain terkait

- dengan masalah keselamatan;
3. Belum lengkapnya data kecelakaan yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan keselamatan jalan;
 4. Bidang keselamatan jalan belum mendapatkan perhatian yang lebih oleh pemerintah daerah sehingga program-program peningkatan keselamatan jalan belum berjalan dengan maksimal.
- e. Permasalahan Ketatausahaan
- Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi khusus seperti Penguji Kendaraan Bermotor dan PPNS di Satuan Pelayanan Terminal dan UPPKB Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan secara teknis dan administrasi mengingat wilayah kerja yang cukup luas.

I.5. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Tugas dan Fungsi Unit Kerja
- I.3. Sumber Daya Manusia Unit Kerja
- I.4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- I.5. Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- II.1. Uraian Singkat Perencanaan Strategis
- II.2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019
- II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- III.1. Tahapan Pengukuran Kinerja
 - III.2. Pengukuran Capaian Kinerja
 - III.2.1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Terhadap Target PK Tahun 2019
 - III.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2019 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2019
 - III.2.3. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan serta Alternatif Solusi terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Utama 2019
 - III.3. Kontribusi Balai Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
 - III.4. Realisasi Anggaran
 - III.4.1. Alokasi Total Anggaran Tahun 2019
 - III.4.2. Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja
 - III.4.3. Hambatan dan Kendala

BAB IV PENUTUP

- IV.1. Kesimpulan dan Saran

LAMPIRAN

- Lampiran I. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
- Lampiran II. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019
- Lampiran III. Rencana Aksi Tahun 2020

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA



II.1. Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2019 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu 2015-2019 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2015-2019 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan perhubungan.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Darat Tahun 2019, sebagaimana tabel berikutini:

Tabel II.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta 2015-2019 sesuai Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan	1. Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan	Trayek
		2. Jumlah trayek AKAP	Trayek
		3. Jumlah lintas angkutan penyeberangan komersil	Lintas
		4. Jumlah lintas angkutan penyeberangan perintis	Lintas
		5. Jumlah Pengoperasian terminal Terminal Tipe A	Lokasi

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(5)
	Angkutan Perkotaan		
2.	Terwujudnya Keselamatan Berjalan di Jalan dan Penyeberangan	6. Jumlah Sarana Dan Prasarana Keselamatan Transportasi Darat	
		a. Jumlah Marka Jalan	M ¹
		b. Jumlah Delineator	Unit
		c. Jumlah Rambu Lalu Lintas	Unit
		d. Jumlah APILL	Unit
		e. Jumlah Alat Penerangan Jalan	Unit
		f. Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (guard rail)	M'
		7. Jumlah perlengkapan jalan yang dipelihara	Unit
		8. Jumlah UPPKB yang dioperasikan	Lokasi
		9. Jumlah Monitoring Dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat	Kegiatan
		10. Jumlah Monitoring dan Pengawasan LLAJ	Kegiatan
		11. Jumlah Monitoring dan Pengawasan SDP	Kegiatan
		12. Jumlah Kontingensi Bencana Dan Tanggap Darurat	Kegiatan
		13. Terlaksananya monitoring dan pengawasan teknis penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Kegiatan
		14. Jumlah ATCS Lanjutan	Kota
		15. Terlaksananya aksi keselamatan Jalan	Kegiatan
		16. Jumlah Monitoring Keselamatan Transportasi Darat	Kegiatan
17. Jumlah Kampanye Dan Sosialisasi Keselamatan	Kegiatan		

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(5)
		18. Jumlah Dukungan Bidang Pembinaan Dan Keselamatan	Kegiatan
3.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	19. Jumlah Kota yangt menerapkan Angkutan Umum Massal Perkotaan	Kota
		20. Jumlah kota yang menerapkan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh Ibukota Provinsi/ Kota Besar/ Kota Metropolitan	Kota/Kab
		21. Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan	Kab/Kota
4.	Meningkatnya Kualitas Dan Kinerja ASN BPTD	22. Jumlah Pegawai yang sudah memiliki sertifikat	Orang
		23. Terlaksananya peningkatan motivasi pegawai BPTD Wil X Prov. Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta	Kegiatan
		24. Terlaksananya Bimtek dan sosialisasi BPTD	Kegiatan
5.	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	25. Jumlah Pembangunan Terminal	Lokasi
		26. Jumlah Rehabilitasi Terminal	Lokasi
6.	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di BPTD	27. Nilai AKIP	Nilai
		28. Tingkat Penyerapan Anggaran	%
		29. Nilai Aset yang diinventarisasi	Rp.
		30. Penyelenggaraan Administrasi Dan Layanan Perkantoran	Bulan
		31. Penyelenggaraan Belanja Pegawai Termasuk Tunjangan	Bulan
		32. Tersusunnya bahan RKA	Laporan

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(5)
		33. Tersusunnya Lakip, Laptah dan Penetapan	Laporan

II.2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019

Perencanaan kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan berdasarkan Indikator Kinerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ini ditetapkan rencana capaian kinerja tahun 2019 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 terdiri dari Indikator Kinerja guna mencapai Sasaran dengan target yang akan dicapai. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel II.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan	1. Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan	Trayek	2
		2. Jumlah trayek AKAP	Trayek	
		3. Jumlah lintas angkutan penyeberangan komersil	Lintas	1
		4. Jumlah lintas angkutan penyeberangan perintis	Lintas	1
		5. Jumlah Pengoperasian terminal Terminal Tipe A	Lokasi	20

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Terwujudnya Keselamatan Berjalan Lintas di Jalan dan Penyeberangan	6. Jumlah Sarana Dan Prasarana Keselamatan Transportasi Darat		
		a. Jumlah Marka Jalan	M ¹	11000
		b. Jumlah Delineator	Unit	1200
		c. Jumlah Rambu Lalu Lintas	Unit	940
		d. Jumlah APILL	Unit	27
		e. Jumlah Alat Penerangan Jalan	Unit	600
		f. Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (guard rail)	M'	960
		7. Jumlah perlengkapan jalan yang dipelihara	Unit	10
		8. Jumlah UPPKB yang dioperasikan	Lokasi	10
		9. Jumlah Monitoring Dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat	Kegiatan	1
		10. Jumlah Monitoring dan Pengawasan LLAJ	Kegiatan	1
		11. Jumlah Monitoring dan Pengawasan SDP	Kegiatan	1
		12. Jumlah Kontingensi Bencana Dan Tanggap Darurat	Kegiatan	1
		13. Terlaksananya monitoring dan pengawasan teknis penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Kegiatan	1
		14. Jumlah ATCS Lanjutan	Kota	1
15. Terlaksananya aksi keselamatan Jalan	Kegiatan	1		

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		16. Jumlah Monitoring Keselamatan Transportasi Darat	Kegiatan	1
		17. Jumlah Kampanye Dan Sosialisasi Keselamatan	Kegiatan	1
		18. Jumlah Dukungan Bidang Pembinaan Dan Keselamatan	Kegiatan	1
6.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	19. Jumlah Kota yang menerapkan Angkutan Umum Massal Perkotaan	Kota	2
		20. Jumlah kota yang menerapkan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh Ibukota Provinsi/ Kota Besar/ Kota Metropolitan	Kota/Kab	11
		21. Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan	Kab/Kota	39
7.	Meningkatnya Kualitas Dan Kinerja ASN BPTD	22. Jumlah Pegawai yang sudah memiliki sertifikat	Orang	10
		23. Terlaksananya peningkatan motivasi pegawai BPTD Wil X Prov. Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta	Kegiatan	1
		24. Terlaksananya Bimtek dan sosialisasi BPTD	Kegiatan	1
8.	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	25. Jumlah Pembangunan Terminal	Lokasi	1
		26. Jumlah Rehabilitasi Terminal	Lokasi	3

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di BPTD	27. Nilai AKIP	Nilai	85
		28. Tingkat Penyerapan Anggaran	%	93
		29. Nilai Aset yang diinventarisasi	Rp.	840 M
		30. Penyelenggaraan Administrasi Dan Layanan Perkantoran	Bulan	12
		31. Penyelenggaraan Belanja Pegawai Termasuk Tunjangan	Bulan	14
		32. Tersusunnya bahan RKA	Laporan	1
		33. Tersusunnya Lakip, Laptah dah Penetapan	Laporan	1

II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Penetapan Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kontrak kinerja antara Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2019 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran Rp. **209.612.913.000,-** adalah sebagai berikut:

Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2019

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(5)	
1.	Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan	1. Jumlah trayek keberintisan angkutan jalan	Trayek	2
		2. Jumlah trayek AKAP	Trayek	
		3. Jumlah lintas angkutan penyeberangan komersil	Lintas	1
		4. Jumlah lintas angkutan penyeberangan perintis	Lintas	1
		5. Jumlah Pengoperasian terminal Terminal Tipe A	Lokasi	20
2.	Terwujudnya Keselamatan Berjalan Lintas di Jalan dan Penyeberangan	6. Jumlah Sarana Dan Prasarana Keselamatan Transportasi Darat		
		a. Jumlah Marka Jalan	M ¹	11000
		b. Jumlah Delineator	Unit	1200
		c. Jumlah Rambu Lalu Lintas	Unit	940
		d. Jumlah APILL	Unit	27
		e. Jumlah Alat Penerangan Jalan	Unit	600
		f. Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (guard rail)	M'	960
		7. Jumlah perlengkapan jalan yang dipelihara	Unit	10
		8. Jumlah UPPKB yang dioperasikan	Lokasi	10

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(5)	
		9. Jumlah Monitoring Dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat	Kegiatan	1
		10. Jumlah Monitoring dan Pengawasan LLAJ	Kegiatan	1
		11. Jumlah Monitoring dan Pengawasan SDP	Kegiatan	1
		12. Jumlah Kontingensi Bencana Dan Tanggap Darurat	Kegiatan	1
		13. Terlaksananya monitoring dan pengawasan teknis penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Kegiatan	1
		14. Jumlah ATCS Lanjutan	Kota	1
		15. Terlaksananya aksi keselamatan Jalan	Kegiatan	1
		16. Jumlah Monitoring Keselamatan Transportasi Darat	Kegiatan	1
		17. Jumlah Kampanye Dan Sosialisasi Keselamatan	Kegiatan	1
		18. Jumlah Dukungan Bidang Pembinaan Dan Keselamatan	Kegiatan	1
3.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	19. Jumlah Kota yangt menerapkan Angkutan Umum Massal Perkotaan	Kota	2
		20. Jumlah kota yang menerapkan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh Ibukota Provinsi/ Kota Besar/ Kota Metropolitan	Kota/Kab	11

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(5)	
		21. Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan	Kab/Kota	39
4.	Meningkatnya Kualitas Dan Kinerja ASN BPTD	22. Jumlah Pegawai yang sudah memiliki sertifikat	Orang	10
		23. Terlaksananya peningkatan motivasi pegawai BPTD Wil X Prov. Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta	Kegiatan	1
		24. Terlaksananya Bimtek dan sosialisasi BPTD	Kegiatan	1
5.	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	25. Jumlah Pembangunan Terminal	Lokasi	1
		26. Jumlah Rehabilitasi Terminal	Lokasi	3
6.	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di BPTD	27. Nilai AKIP	Nilai	85
		28. Tingkat Penyerapan Anggaran	%	93
		29. Nilai Aset yang diinventarisasi	Rp.	840 M
		30. Penyelenggaraan Administrasi Dan Layanan Perkantoran	Bulan	12
		31. Penyelenggaraan Belanja Pegawai Termasuk Tunjangan	Bulan	14
		32. Tersusunnya bahan RKA	Laporan	1
		33. Tersusunnya Lakip, Laptah dah Penetapan	Laporan	1



BAB 3

AKUNTABILITAS

KINERJA

III.1. Tahapan Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan visi dan misinya. Mekanisme pengelolaan kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui aplikasi *E-performance* dimulai dari target-target yang telah ditetapkan dalam PK yang kemudian dilakukan pengukuran dan pelaporan, monitoring dan evaluasi secara berkala melalui aplikasi *E-Performance* yang berbasis web. Pelaksanaan pengelolaan pengukuran kinerja dilakukan sepanjang tahun yang meliputi proses penginputan, validasi, dan pelaporan secara berkala setiap awal bulan. Proses dan kegiatan tersebut dilakukan secara bersama-sama antara pengelola data dan laporan kinerja di Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

III.2. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Prosentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja prosentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama:

1. Prosentase pengukuran IKU (Unit)

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ a IKU (Unit)} = \frac{\text{Realisasi a IKU (Unit)}}{\text{Rencana atau target a IKU (Unit)}} \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ a IKU (Unit)} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) \text{ a IKU (Unit)}}{\text{Rencana atau target a IKU (Unit)}} \times 100 \%$$

2. Rata-rata nilai capaian IKU terhadap Sasaran (Unit)

$$= \frac{\text{Total jumlah realisasi IKU (Unit) dalam a Sasaran}}{\text{Total jumlah rencana IKU (Unit) dalam a Sasaran}} \times 100 \%$$

3. Rata-rata nilai capaian seluruh IKU yang dilaksanakan (Unit)

$$= \frac{\text{Total jumlah realisasi IKU (Unit) dalam a Sasaran}}{\text{Total jumlah rencana IKU (Unit) dalam a Sasaran}} \times 100 \%$$

Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Tahun 2019

Hasil pengukuran kinerja Di Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja yang berdasarkan pendekatan pendanaan. Untuk mewujudkan tujuh tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2019

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK 2019	Realisasi	Capaian Triwulan				
						Tw. I	Tw. II	Tw.III	Tw. IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1.	Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang handal,berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional dan peningkatan Angkutan Perkotaan	1.	Jumlah Trayek Keperintisan	Trayek	2	2				2
		2.	Jumlah Trayek AKAP	Trayek						
		3.	Jumlah Lintas Angkutan Penyeberangan Komersil	Lintas	1	1				1
		4	Jumlah Lintas Angkutan Perintis	Lintas	1	1				1
		5.	Jumlah Pengoperasian Terminal Tipe A	Lokasi	20	20	20	20	20	20
2.	Terwujudnya Keselamatan Berlau Lintas di Jalan dan Penyeberangan	6.	Jumlah Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi Darat							
		a.	Jumlah Marka Jalan	M ¹	11000				11000	
		b.	Jumlah Delineator	Unit	1200				1200	
		c.	Jumlah Rambu Lalu Lintas	Unit	940				940	

		d. Jumlah APILL	Unit	27				27	
		e. Jumlah alat penerangan jalan	Unit	600				600	
		f. Jumlah alat pengendali dan pengaman pengguna jalan (guard rail)	M	960				960	
	7.	Jumlah Perlengkapan Jalan yang di Pelihara	Unit	10					10
	8.	Jumlah UPPKB yang di Operasionalkan	Lokasi	10	10	10	10	10	10
	9.	Jumlah Monitoring dan Pengawasan sarana dan prasarana perhubungan darat	Kegiatan	1					1
	10.	Jumlah Monitoring dan Pengawasan LLAJ	Kegiatan	1					1
	11.	Jumlah Monitoring dan Pengawasan SDP	Kegiatan	1					1
	12.	Jumlah Kontingensi Bencana dan Tanggap Darurat	Kegiatan	1					1
	13.	Terlaksananya monitoring dan pengawasan teknis penyelenggaraan	Kegiatan	1					1

			angkutan lebaran,natal dan tahun baru							
		14.	Jumlah ATCS Lanjutan	Kota	3				2	
		15.	Terlaksananya aksi keselamatan jalan	kegiatan	1			1		
		16.	Jumlah Monitoring Keselamatan Transportasi Darat	kegiatan	1					1
		17.	Jumlah Kampanye dan Sosialisasi Keselamatan	kegiatan	1				1	
		18.	Jumlah Dukungan Bidang Pembinaan dan Keselamatan	kegiatan	1					1
3.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	19.	Jumlah Kota yang menerapkan angkutan umum massal perkotaan	kota	2					2
		20.	Jumlah kota yang menerapkan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh Ibukota Provinsi/Kota Besar/Kota Metropolitan	Kota/Kab	11		11	11	11	11

		21.	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Kalibrasi alat uji kendaraan	Kab/Kota	39					39
4.	Meningkatnya Kualitas dan Kinerja ASN BPTD	22.	Jumlah pegawai yang sudah memiliki sertifikat	orang	10	100	0	20	40	40
		23.	Terlaksananya peningkatan motivasi pegawai BPTD Wil.X Prov.Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta	kegiatan	1	3				3
		24.	Terlaksananya Bimtek dan Sosialisasi BPTD	Kegiatan	1					1
5.	Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi darat	25.	Jumlah pembangunan terminal	lokasi	1				1	
		26.	Jumlah rehabilitasi terminal	lokasi	3				3	
6.	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di BPTD	27.	Nilai AKIP	Nilai	85					83,8
		28.	Tingkat Penyerapan Anggaran	%	93	95,69%				95,69%
		29.	Nilai Aset yang di Inventarisasi	Rp.	840M					840M
		30.	Penyelenggaraan Administrasi dan Layanan Perkantoran	Bulan	12		3	3	3	3

		31.	Penyelenggara Belanja Pegawai Termasuk Tunjangan	Bulan	14		3	4	3	4
		32.	Tersusun bahan RKA	Laporan	1				1	
		33.	Tersusun Lakip,Laptah dan Penetapan Kinerja	Laporan	1					1

III.2.1. Perbandingan Target PK Tahun 2019 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2019

Selama tahun 2019, ada 6 Sasaran Strategis dan didalamnya ada 33 Indikator Kinerja (IK) dalam Instansi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.



Sasaran Strategis 1

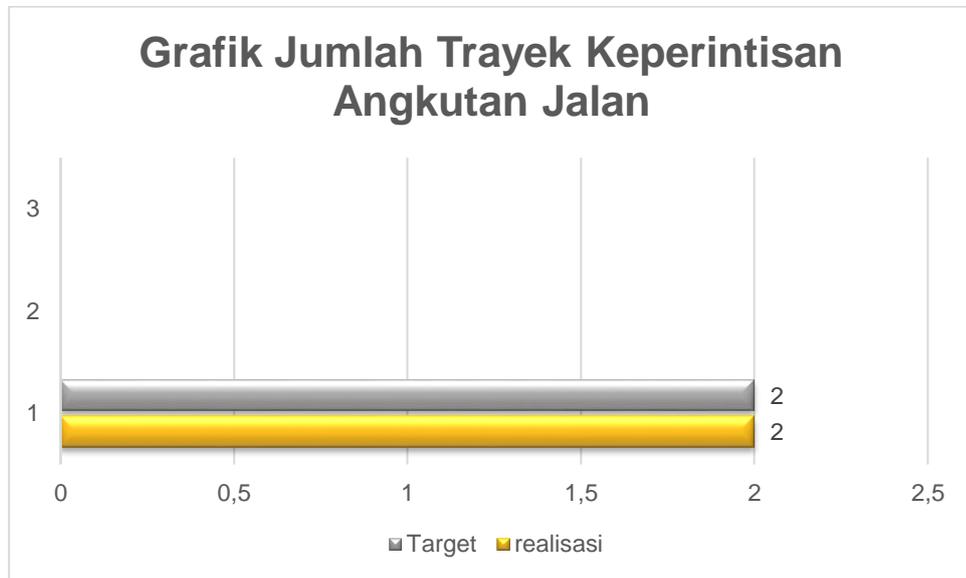
Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional dan peningkatan Angkutan Perkotaan

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu Pembentukan Organisasi di bawah naungan Kementerian Perhubungan yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta 2015-2019. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam ikut membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh balai pengelola transportasi darat wilayah X Provinsi Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta adalah mewujudkan pelayanan transportasi darat handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas

Pencapaian SS 1 diukur melalui 5 (Lima) Indikator Kinerja (IK) Yaitu :

IK. I : Trayek Keperintisan angkutan jalan

Capaian jumlah trayek keperintisan angkutan jalan tahun 2019 sebesar 2 dan sebanding dengan tahun 2018 sebesar 2. Dapat dilihat pada grafik IK.1 :



IK.2 Jumlah Trayek AKAP

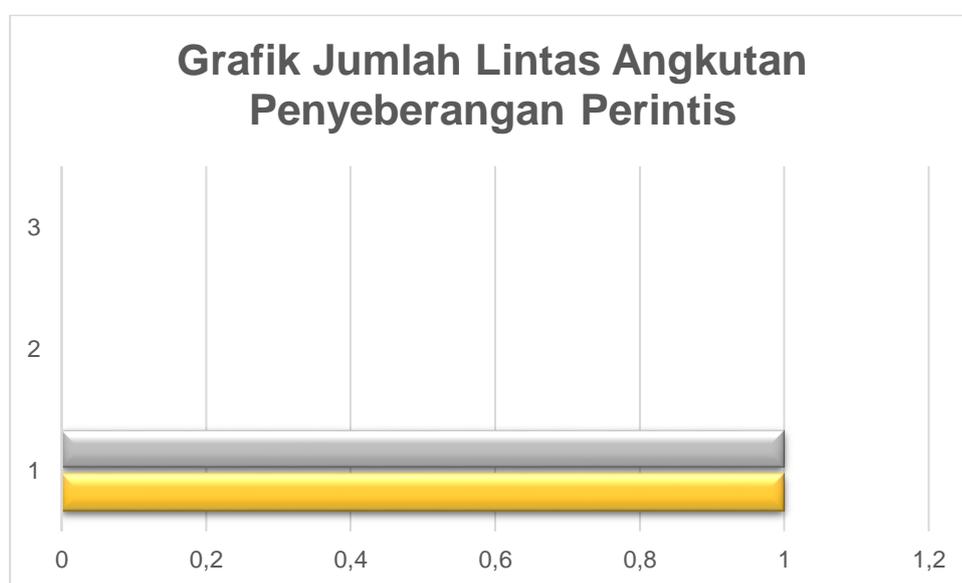
Jumlah trayek AKAP di wilayah kerja BPTD X Provinsi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta pada tahun 2019 data serta informasinya ada pada instansi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

IK.3. Jumlah Lintas Angkutan Penyeberangan Perintis Jumlah Lintas angkutan penyeberangan perintis tahun 2019 Capaian jumlah lintas angkutan penyeberangan perintis tahun 2019 sebesar 1



IK.4 Jumlah Lintas Angkutan Penyeberangan Perintis

Jumlah Lintas angkutan penyeberangan perintis tahun 2019 capaian jumlahnya sebesar 1 sebanding dengan jumlah lintas angkutan perintis 2018 sebesar 1, berikut grafik jumlah lintas angkutan penyeberangan perintis



III.2.2. PERBANDINGAN TARGET 2015-2019 TERHADAP REALISASI Pada Tahun 2015-2019

Sasaran Strategis satu yaitu Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional dan peningkatan Angkutan Perkotaan. Berikut dilampirkan perbandingan target tahun 2015-2019 terhadap realisasi tahun 2015-2019 pada sasaran strategis 1 (satu) yang terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja. Adapun data yang disampaikan berupa table dan grafik perbandingan target dengan realisasi dari tahun 2015-2019.

IK.1 Jumlah Trayek Keperintisan Angkutan Jalan

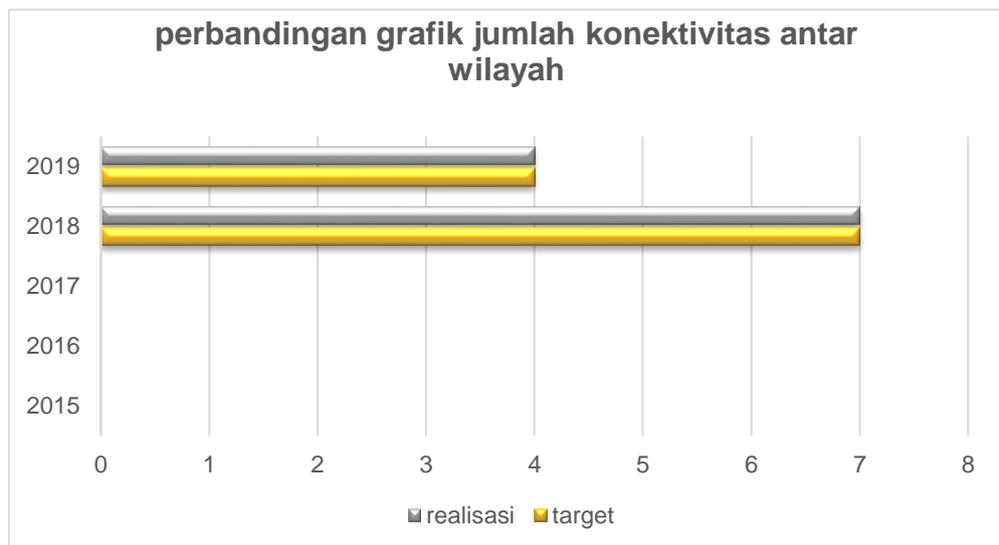
Pada tahun 2019 untuk menindaklanjuti rekomendasi evaluasi dari Tim Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Indikator kinerja yang baru merupakan indikator kinerja

berupa outcome sebagai kontribusi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Kementerian Perhubungan

IK.1 Konektivitas antar wilayah meliputi Jumlah Trayek Keperintisan angkutan jalan, jumlah trayek AKAP, jumlah lintas Penyeberangan Komersil dan jumlah Penyeberangan perintis

Target tahun 2019 terkait konektivitas antar wilayah terdiri dari, 2 Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan, 1 jumlah lintas angkutan penyeberangan perintis dan 1 jumlah lintas angkutan penyeberangan komersil, dan realisasinya sebesar 4 atau mencapai 100%. Berikut disampaikan table capaian dan grafik capaian dari tahun 2015 – 2019.

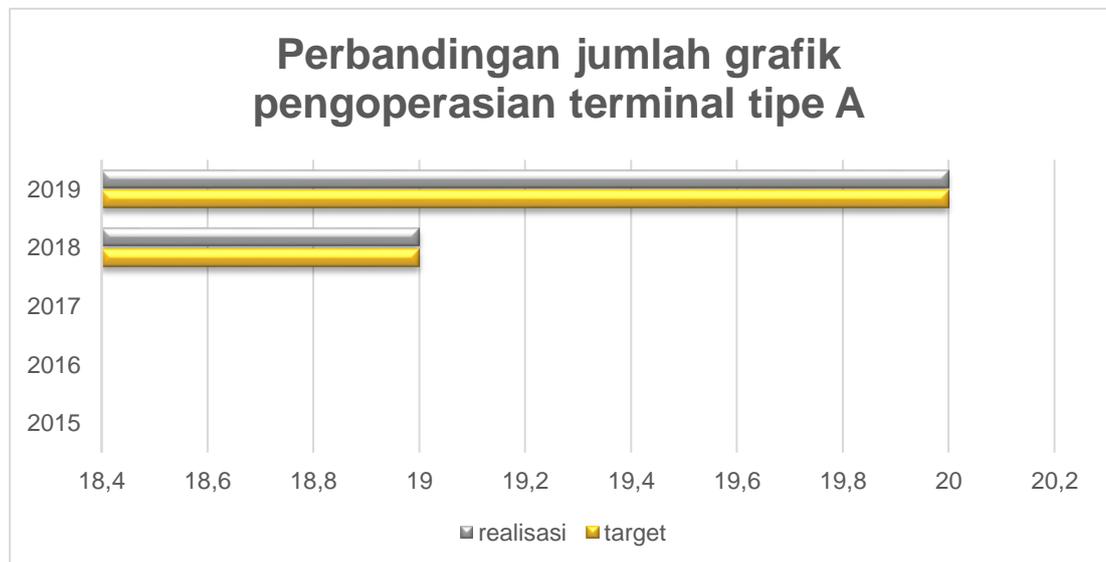
	2015	2016	2017	2018	2019
Target	-	-	-	7	4
Realisasi	-	-	-	7	4
Capaian	-	-	-	100%	100%



IK.5. Jumlah Pengoperasian Terminal Tipe

Pada tahun 2019 di instansi BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta, terdapat 20 lokasi terminal tipe A yang dioperasikan, mencapai target beserta realisasinya pada tahun 2019. Berikut table beserta grafik perbandingan jumlah pengoperasian terminal tipe A.

	2015	2016	2017	2018	2019
Target	-	-	-	19	20
Realisasi	-	-	-	19	20
Capaian	-	-	-	100%	100%



III.2.3. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Dalam Sasaran strategis satu terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional dan peningkatan angkutan perkotaan, wujud nyata dari konektivitas antar wilayah di instansi balai pengelola transportasi darat wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta jumlahnya mencapai 4 konektivitas yang terdiri dari , jumlah trayek keperintisan angkutan jalan sebanyak 2 trayek, jumlah lintas angkutan penyeberangan perintis 1 lintas, jumlah lintas angkutan penyeberangan komersil 1 lintas, total dari keseluruhan konektivitas antar wilayah tersebut menjadi 4 target dan dapat terpenuhi semuanya.



Sasaran Strategis 2

Terwujudnya Keselamatan Berlalu Lintas di Jalan dan
Penyeberangan

Sasaran strategis dua yaitu terwujudnya keselamatan berlalu lintas di jalan dan penyeberangan terdiri dari 13 Indikator Kinerja , yaitu: Jumlah sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat, jumlah perlengkapan jalan yang dipelihara, jumlah UPPKB yang di operasionalkan , jumlah monitoring dan pengawasan sarana dan prasarana perhubungan darat, jumlah monitoring dan pengawasan LLAJ, Jumlah monitoring dan pengawasan SDP, Jumlah Kontingensi bencana dan tanggap darurat, terlaksananya monitoring dan pengawasan teknis penyelenggaraan angkutan lebaran,natal dan tahun baru, jumlah ATCS Lanjutan, terlaksananya aksi keselamatan jalan, jumlah monitoring keselamatan transportasi darat,jumlah kampanye dan sosialisasi keselamatan, jumlah dukungan bidang pembinaan dan keselamatan.

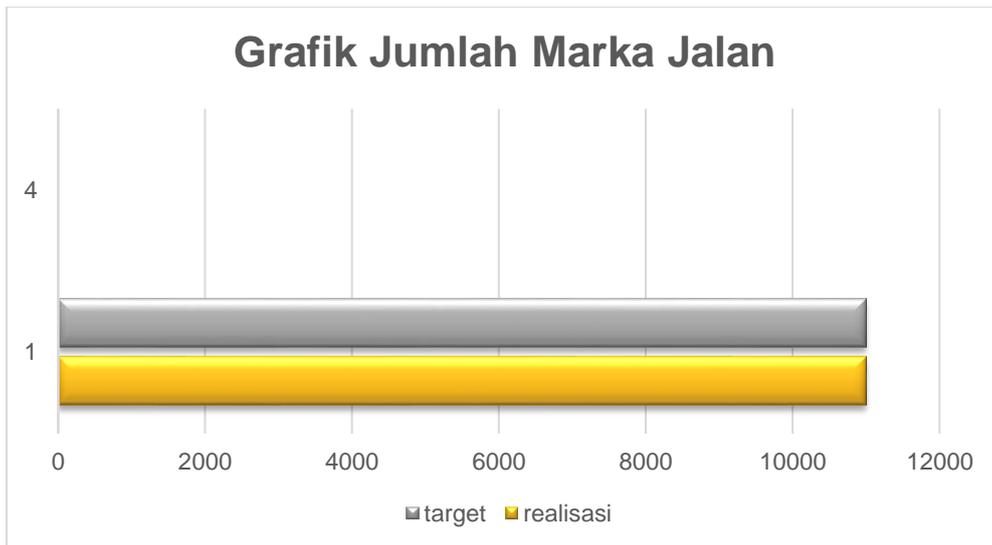
III.3.1. Perbandingan Target 2019 Terhadap Realisasi 2019

Pencapaian Sasaran Strategis dua diukur melalui 13 Indikator Kinerja (IK), Yaitu:

IK.6. Jumlah Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi Darat

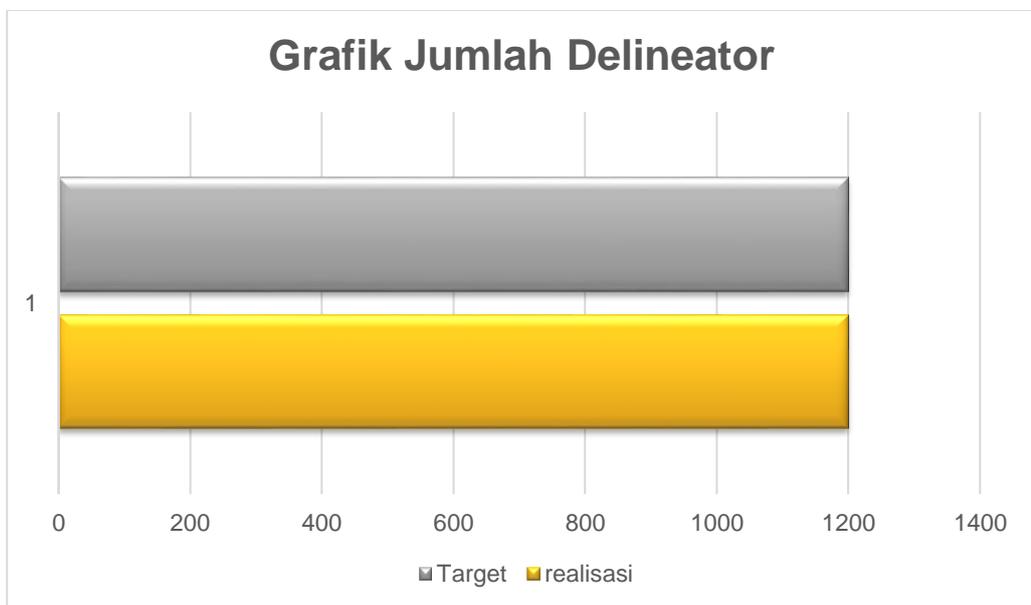
a. Jumlah Marka Jalan:

Capaian jumlah Marka jalan tahun 2019 sebanyak 11.000M¹ seperti yang tertera pada grafik berikut ini:



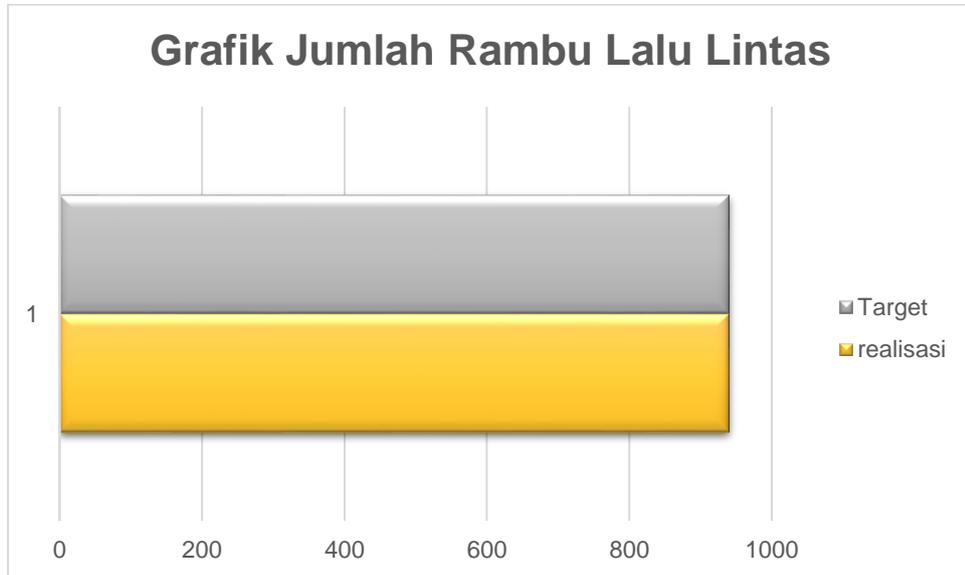
b. Jumlah Delineator

Capain jumlah delineator tahun 2019 berjumlah 1.200 Unit, seperti yang tertera pada grafik berikut ini:



c. Jumlah Rambu Lalu Lintas

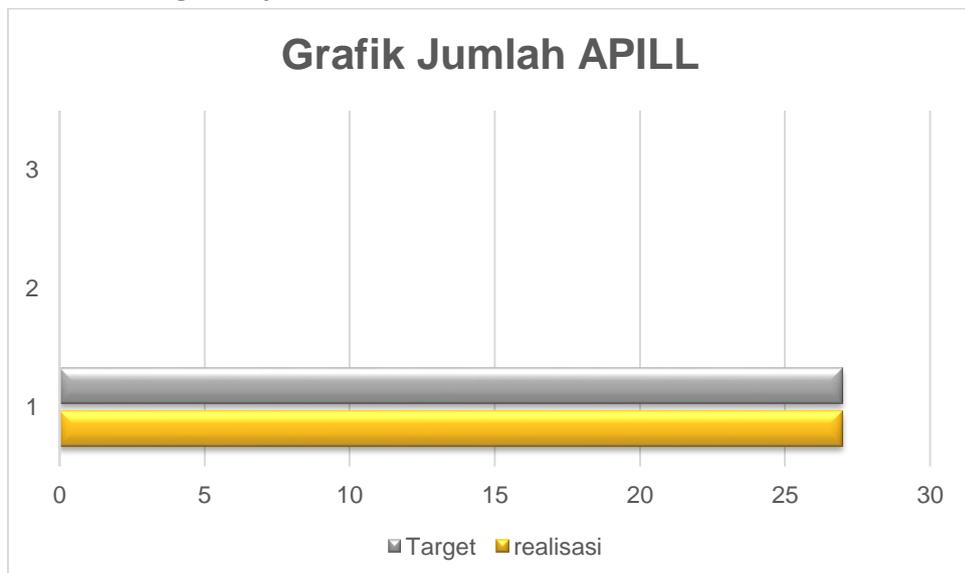
Capaian jumlah rambu lalu lintas tahun 2019 sebesar 940 unit, jika dibandingkan dengan target PK 2019 sebesar 940 unit maka capaian kinerja mencapai 100% target dengan realisasi tercapai.



d. Jumlah APILL

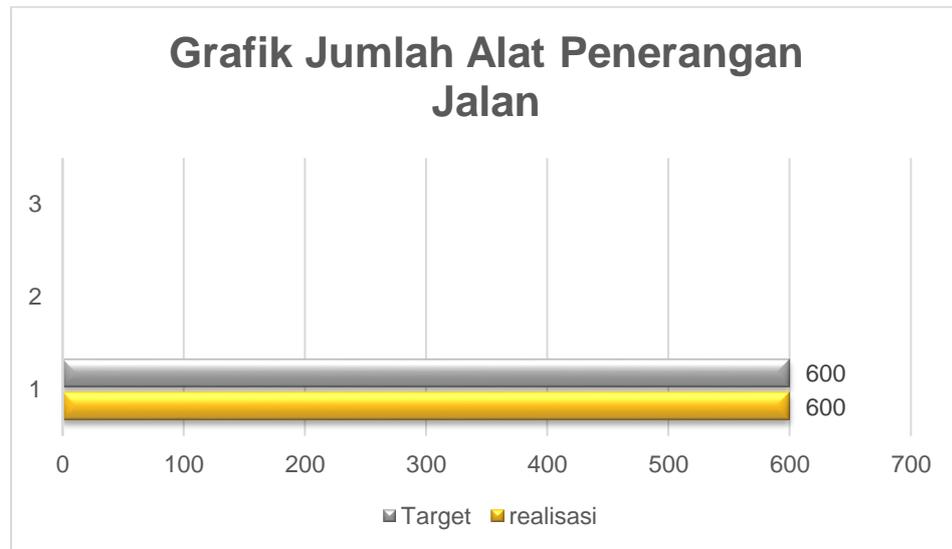
Capaian jumlah APIL tahun 2019 sebesar 27 unit target tercapai 100%.

Berikut grafik jumlah APILL tahun 2019:

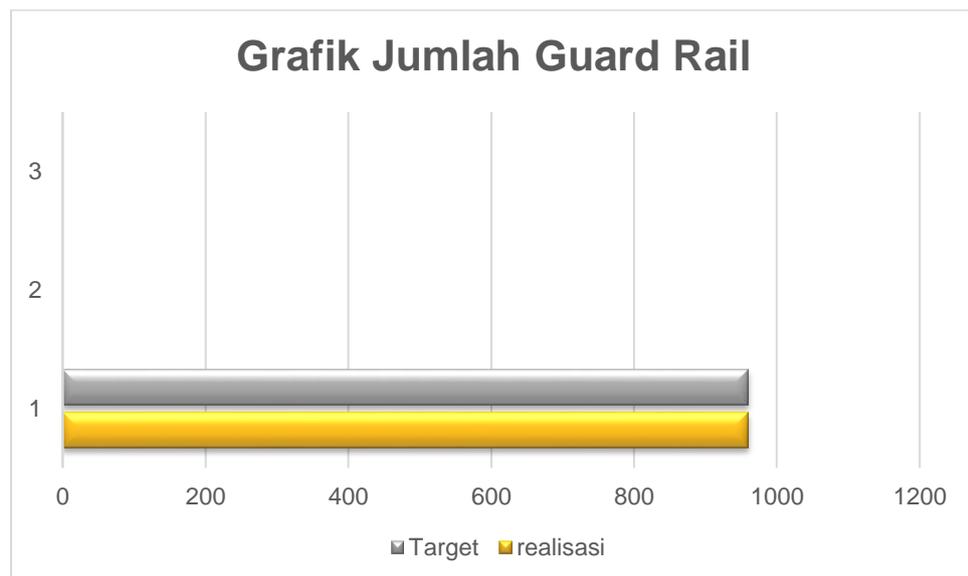


e. Jumlah alat penerangan jalan

Capaian jumlah alat penerangan jalan tahun 2019 sebesar 600 unit, berikut grafik jumlah alat penerangan jalan



- f. Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Guard Rail) Capain Jumlah alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Guard Rail) tahun 2019 sejumlah 960 M', Berikut Grafiknya :



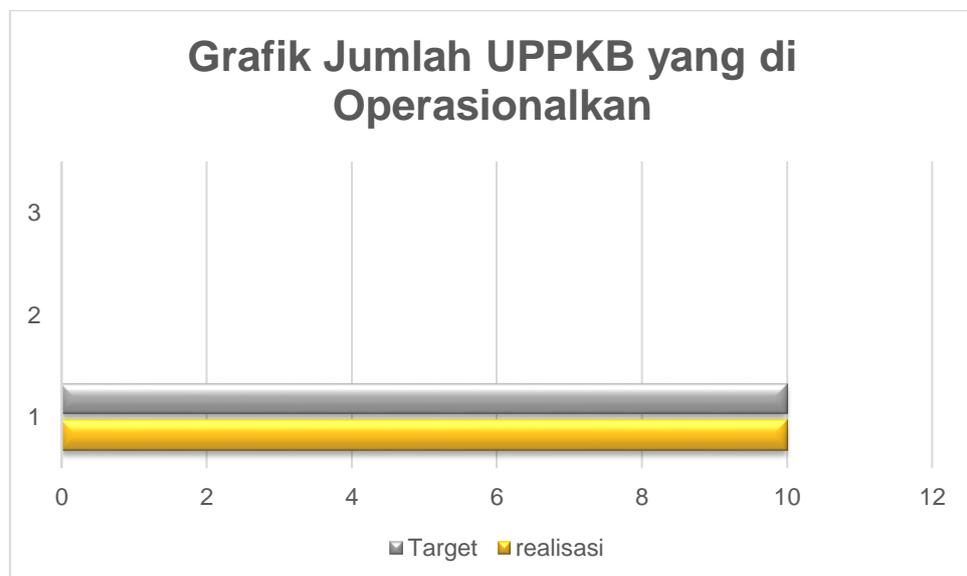
IK.7. JUMLAH PERLENGKAPAN JALAN YANG DIPELIHARA

Capaian jumlah perlengkapan jalan yang dipelihara pada tahun 2019 mencapai 10 unit, berikut grafiknya:



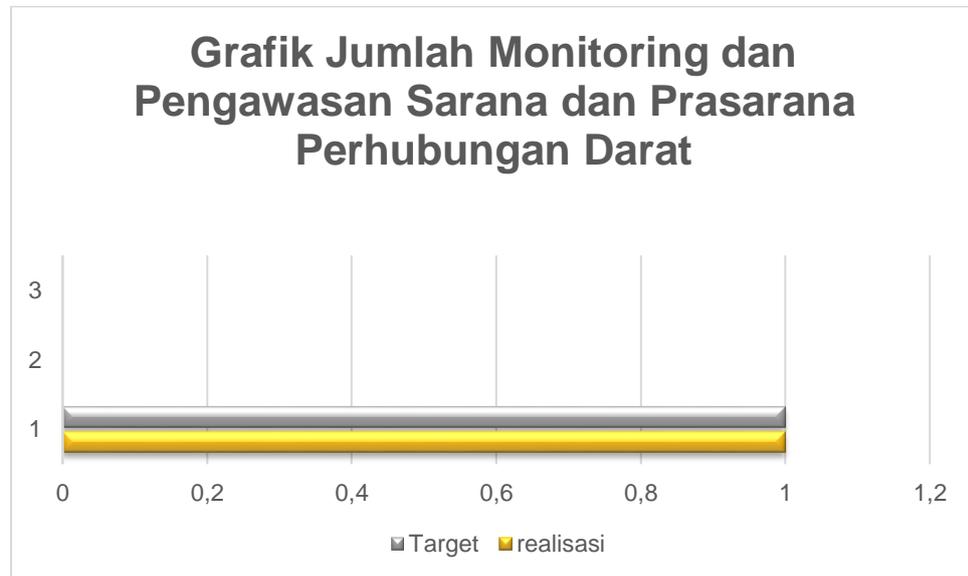
IK. 8. Jumlah Uppkb Yang Dioperasionalkan

Capaian jumlah UPPKB yang dioperasionalkan tahun 2019 sebanyak 10 lokasi yang menyebar di seluruh Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta, berikut Grafik jumlah UPPKB yang dioperasionalkan:



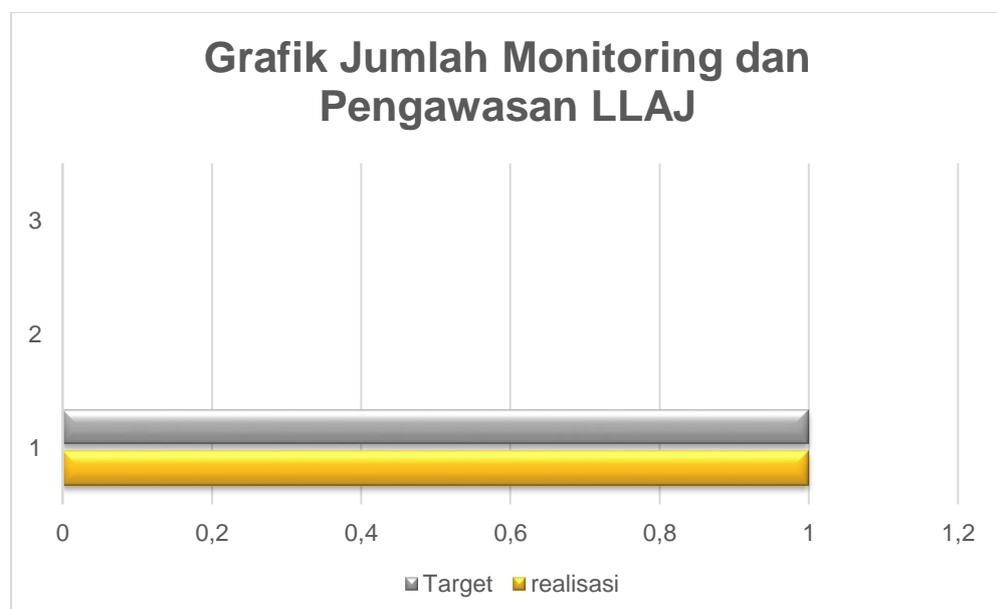
IK.9 Jumlah Monitoring Dan Pengawasan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Darat

Berikut grafik jumlah Monitoring dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat pada tahun 2019 terdapat 1 kegiatan



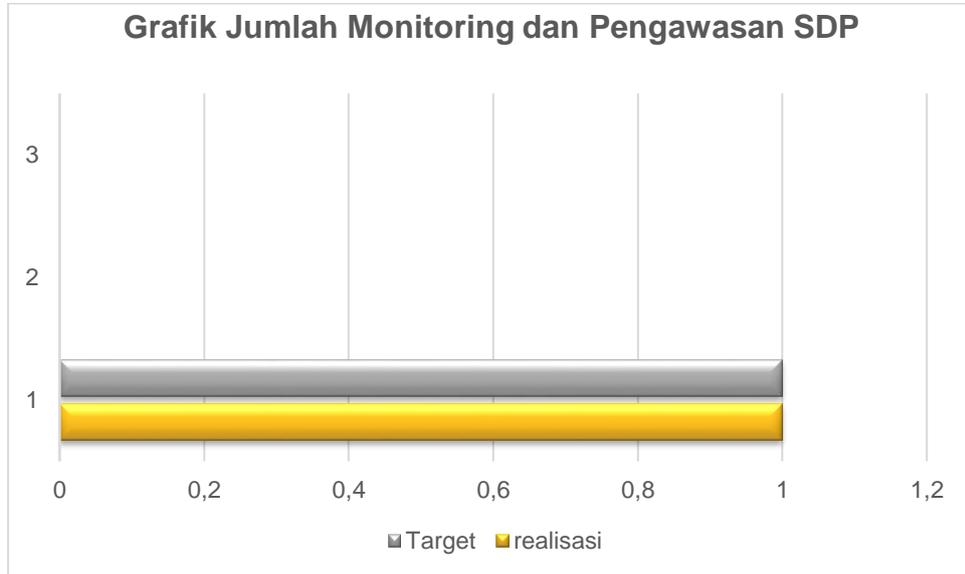
IK.10. Jumlah Monitoring Dan Pengawasan LLAJ

Berikut grafik Jumlah Monitoring dan Pengawasan LLAJ pada tahun 2019 terdapat 1 kegiatan.



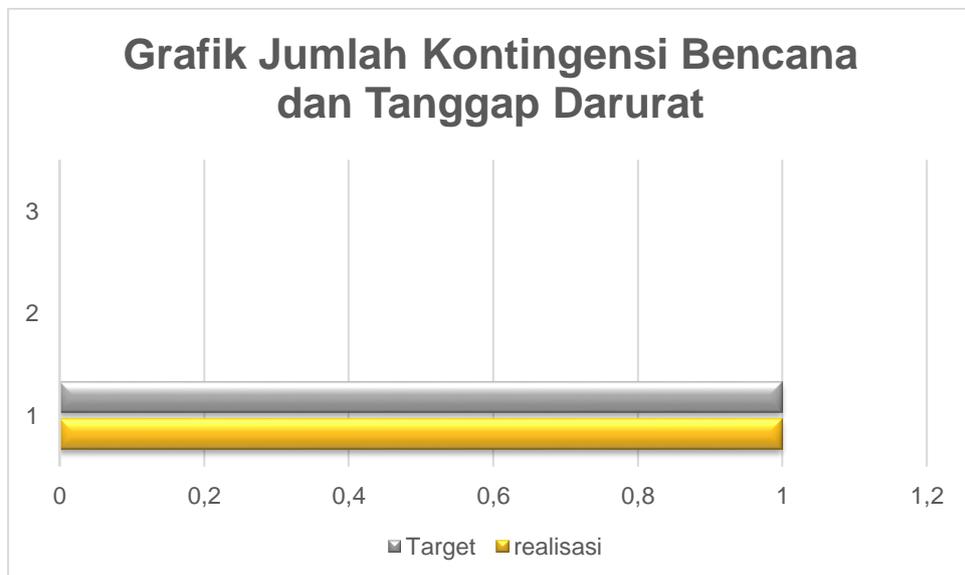
IK.11. Jumlah Monitoring Dan Pengawasan SDP

Berikut grafik Jumlah Monitoring dan Pengawasan SDP pada tahun 2019



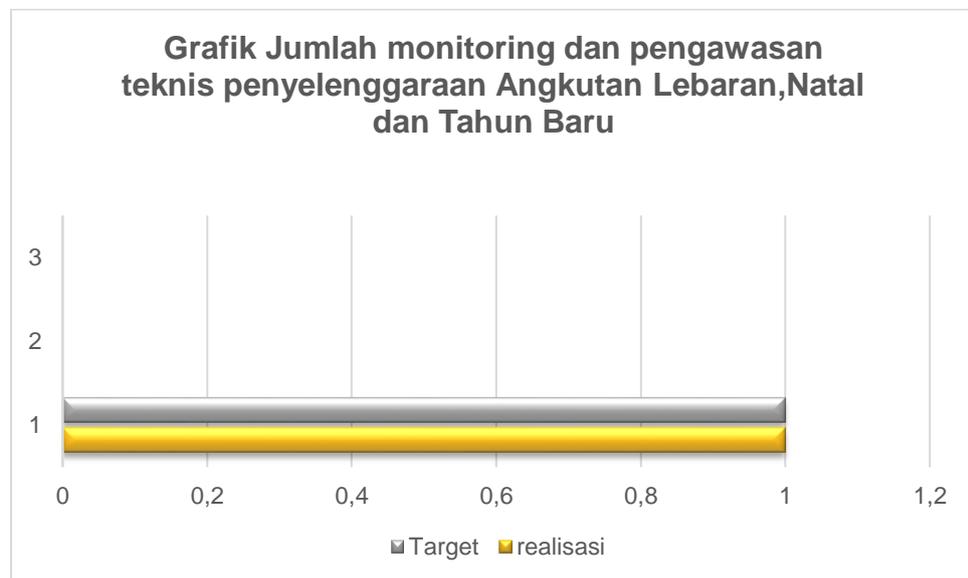
IK.12. Jumlah Kontingensi Bencana Dan Tanggap Darurat

Berikut grafik Jumlah Kontingensi Bencana dan Tanggap Darurat pada tahun 2019 :



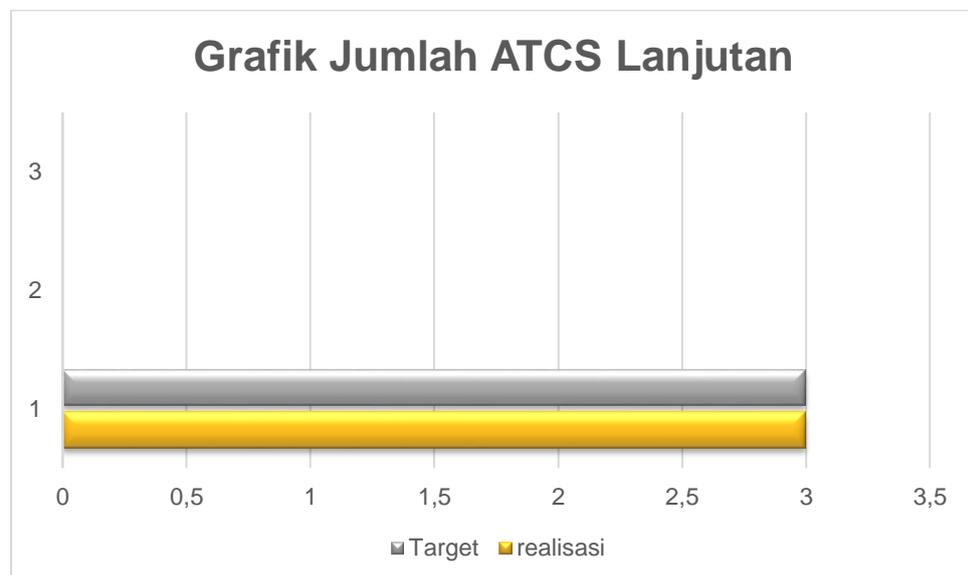
**IK.13. Terlaksananya Monitoring Dan Pengawasan Teknis
Penyelenggaraan Angkutan Lebaran,Natal Dan Tahun Baru**

Berikut grafik terkait pelaksanaan monitoring dan pengawasan teknis penyelenggaraan Angkutan Lebaran,Natal dan Tahun Baru untuk TA.2019 Sebagai berikut:

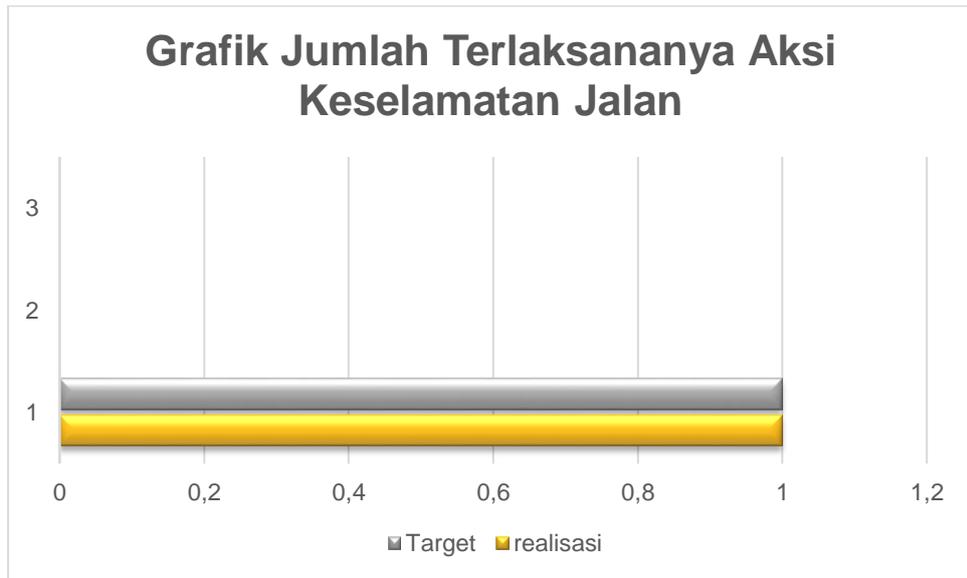


IK.14. Jumlah Atcs Lanjutan

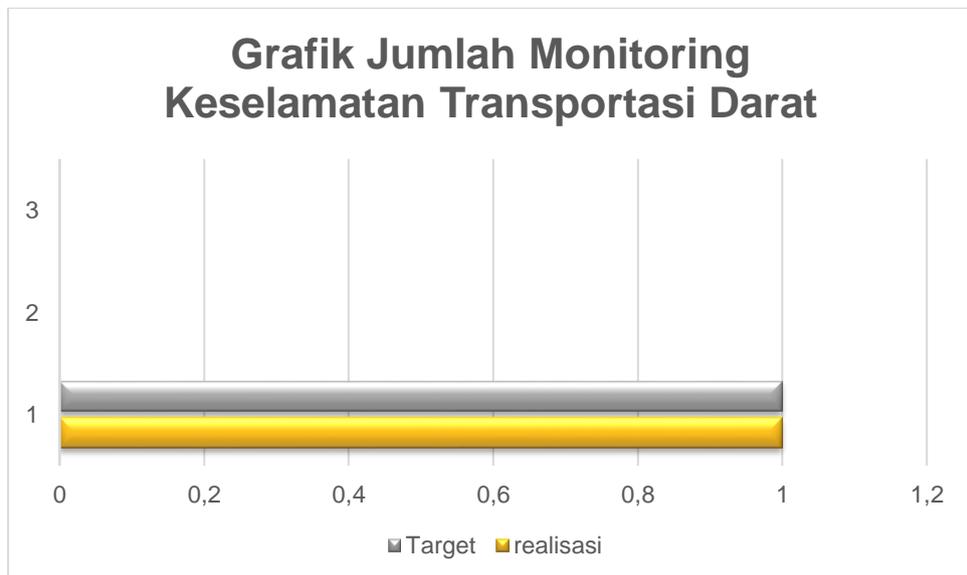
Berikut grafik jumlah ATCS lanjutan tahun 2019 di wilayah Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta sebanyak kota pada tahun 2019 ini.



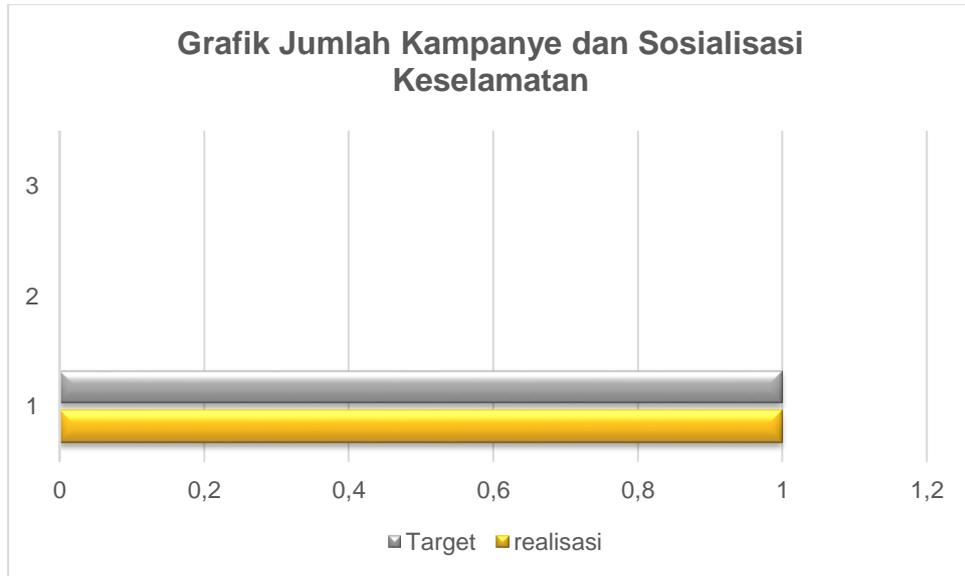
IK.15. Terlaksananya Aksi Keselamatan Jalan



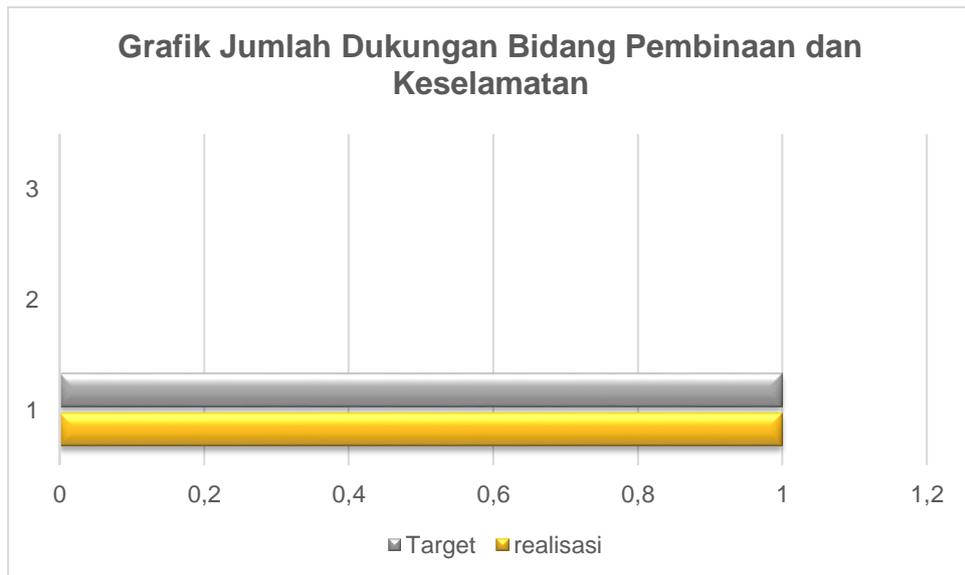
IK.16. Jumlah Monitoring Keselamatan Transportasi Darat



IK.17. Jumlah Kampanye Dan Sosialisasi Keselamatan

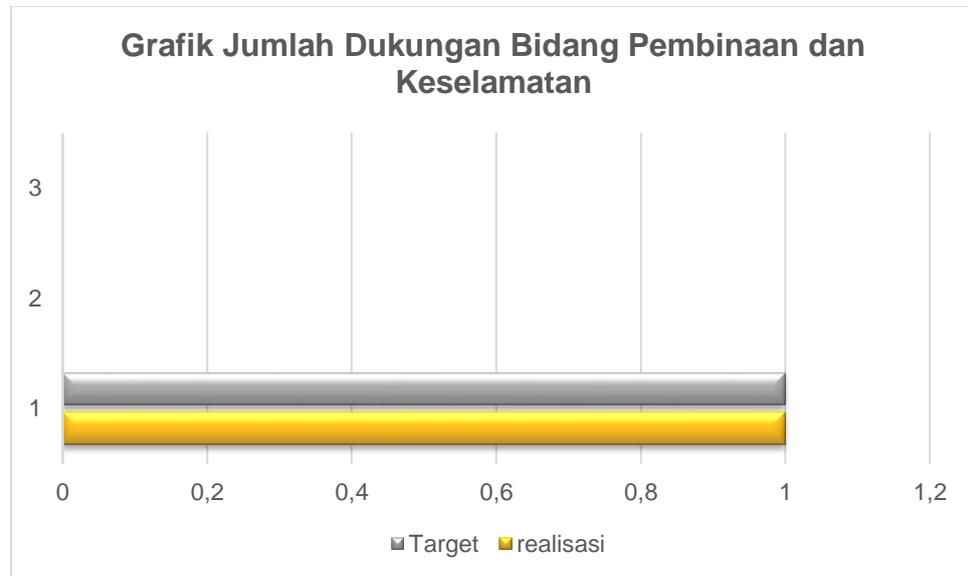


IK.18. Jumlah Dukungan Bidang Pembinaan Dan Keselamatan
Berikut grafik Jumlah Dukungan Bidang Pembinaan dan Keselamatan pada tahun 2019 yaitu sebanyak 1 kegiatan



IK.18. Jumlah Dukungan Bidang Pembinaan Dan Keselamatan

Berikut grafik Jumlah Dukungan Bidang Pembinaan dan Keselamatan pada tahun 2019 yaitu sebanyak 1 kegiatan



III.3.2. PERBANDINGAN TARGET TAHUN 2015-2019 TERHADAP REALISASI 2015-2019

Sasaran strategis dua yaitu terwujudnya keselamatan berlalu lintas di jalan dan penyeberangan terdiri dari 13 Indikator Kinerja , yaitu: Jumlah sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat, jumlah perlengkapan jalan yang dipelihara, jumlah UPPKB yang di operasionalkan , jumlah monitoring dan pengawasan sarana dan prasarana perhubungan darat, jumlah monitoring dan pengawasan LLAJ, Jumlah monitoring dan pengawasan SDP, Jumlah Kontingensi bencana dan tanggap darurat, terlaksananya monitoring dan pengawasan teknis penyelenggaraan angkutan lebaran,natal dan tahun baru, jumlah ATCS Lanjutan, terlaksananya aksi keselamatan jalan, jumlah monitoring keselamatan transportasi darat,jumlah kampanye dan sosialisasi keselamatan, jumlah dukungan bidang pembinaan dan keselamatan.

IK.6 Jumlah Sarana Dan Prasarana Keselamatan Transportasi Darat

Berikut adalah tabel dan grafik perbandingan dari tahun 2015- 2019 terkait jumlah sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat, IK.6 sendiri terdiri dari 6 item diantaranya:

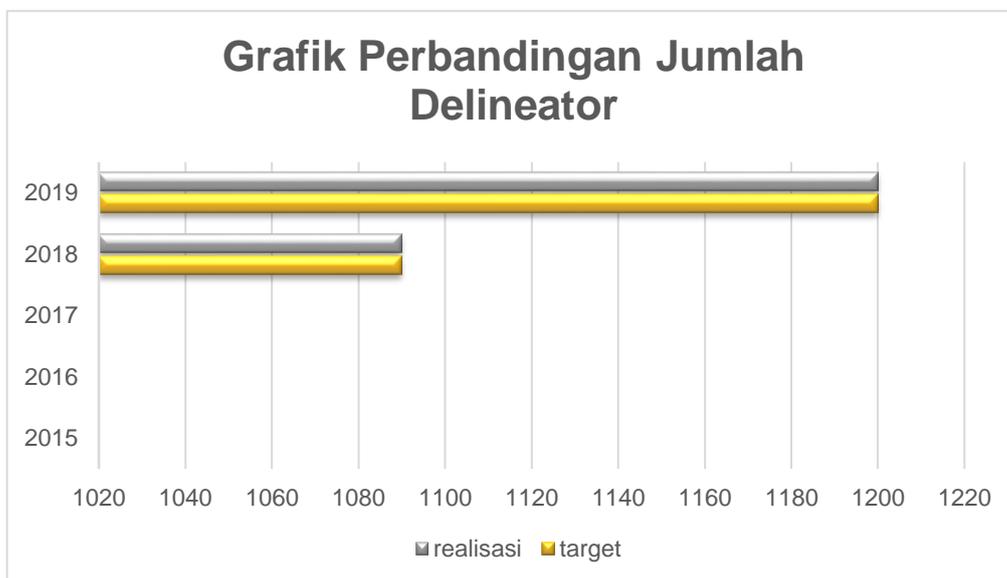
a. Jumlah Marka Jalan

	2015	2016	2017	2018	2019
Target	-	-	-	27.280.361	11000
Realisasi	-	-	-	27.280.361	11000
Capaian	-	-	-	100%	100%



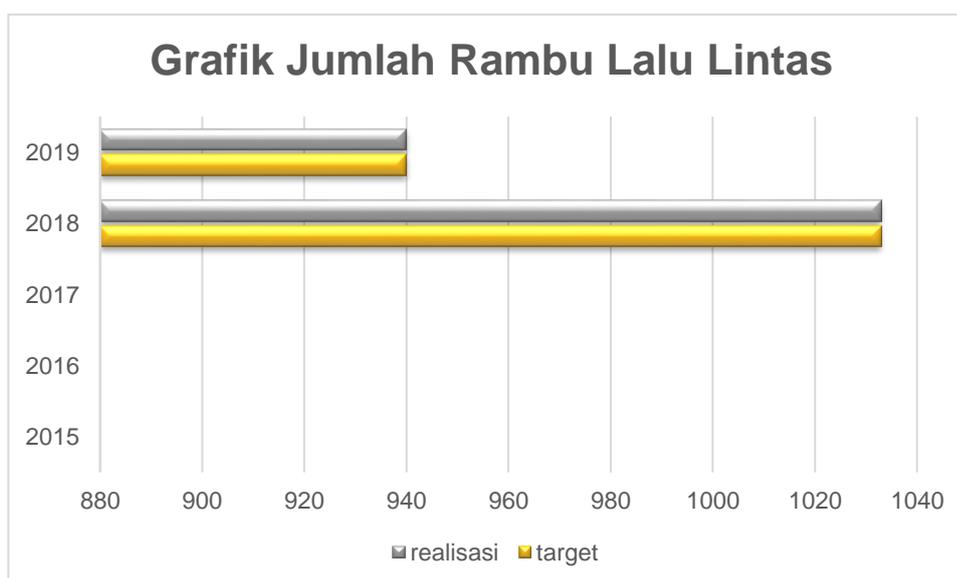
b. Jumlah Delineator

	2015	2016	2017	2018	2019
Target	-	-	-	1090	1200
Realisasi	-	-	-	1090	1200
Capaian	-	-	-	100%	100%



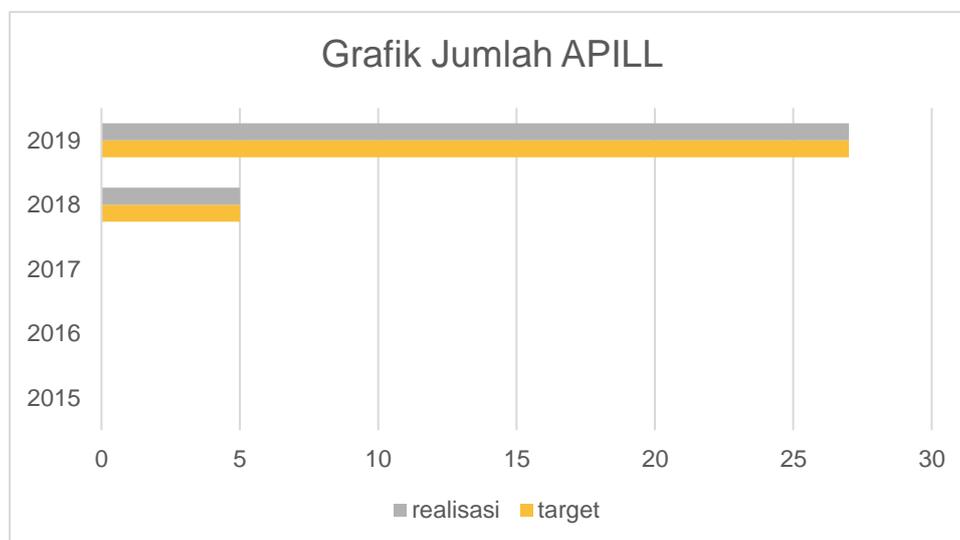
c. Jumlah Rambu Lalu Lintas

	2015	2016	2017	2018	2019
Target	-	-	-	1033	940
Realisasi	-	-	-	1033	940
Capaian	-	-	-	100%	100%



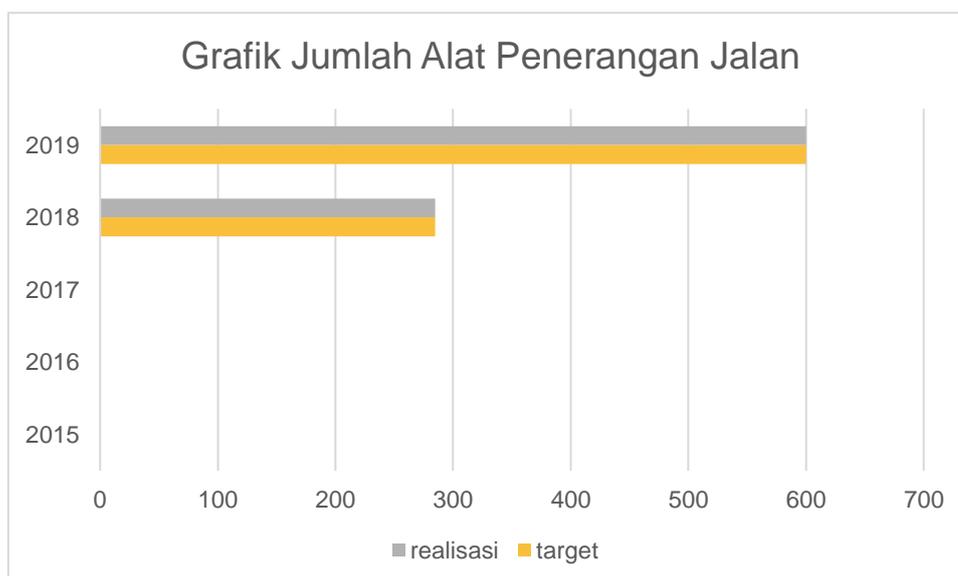
d. Jumlah APILL

	2015	2016	2017	2018	2019
Target	-	-	-	5	27
Realisasi	-	-	-	5	27
Capaian	-	-	-	100%	100%



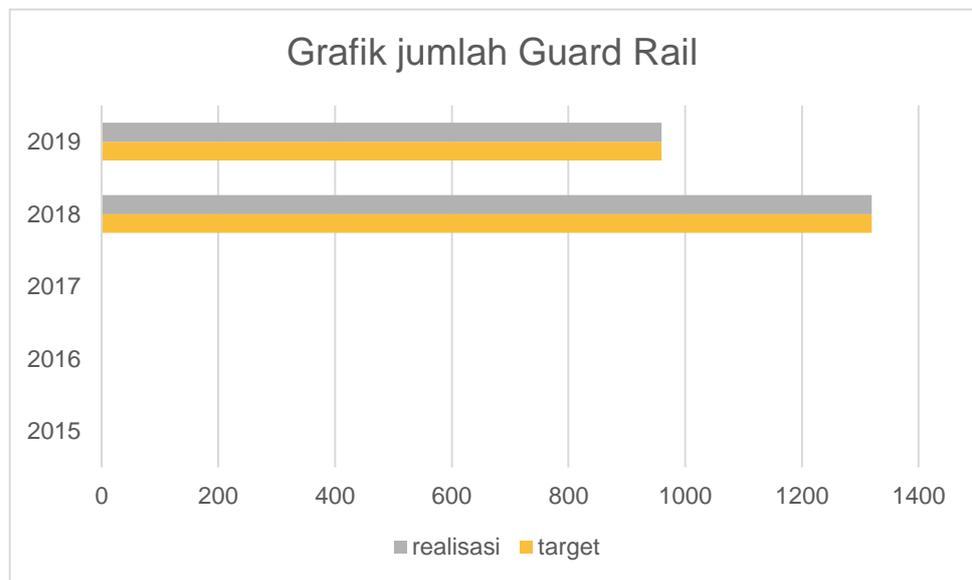
e. Jumlah Alat Penerangan Jalan

	2015	2016	2017	2018	2019
Target	-	-	-	285	600
Realisasi	-	-	-	285	600
Capaian	-	-	-	100%	100%



f. Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan
(Guard Rail)

	2015	2016	2017	2018	2019
Target	-	-	-	1320	960
Realisasi	-	-	-	1320	960
Capaian	-	-	-	100%	100%



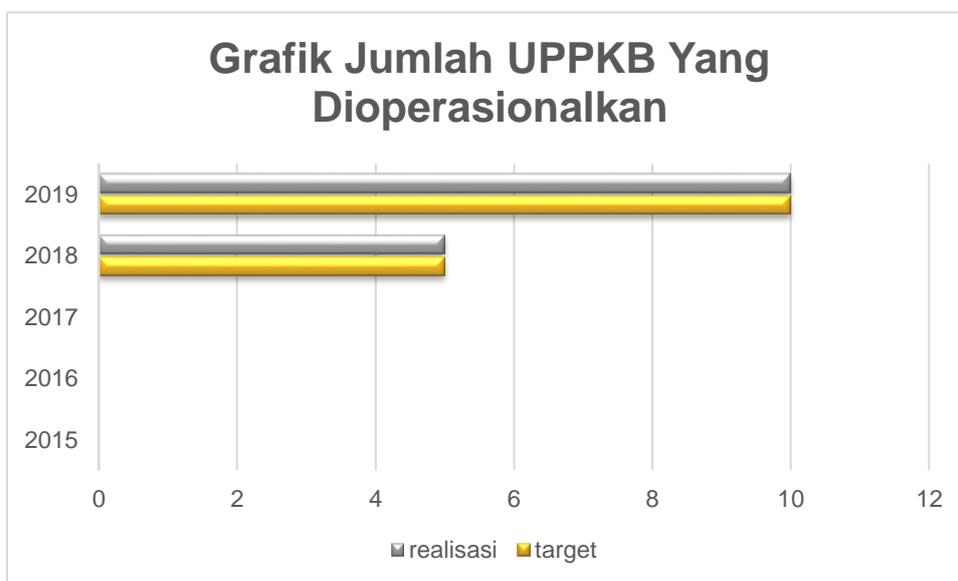
IK.7. Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Di Pelihara

	2015	2016	2017	2018	2019
Target	-	-	-	-	10
Realisasi	-	-	-	-	10
Capaian	-	-	-	-	100%



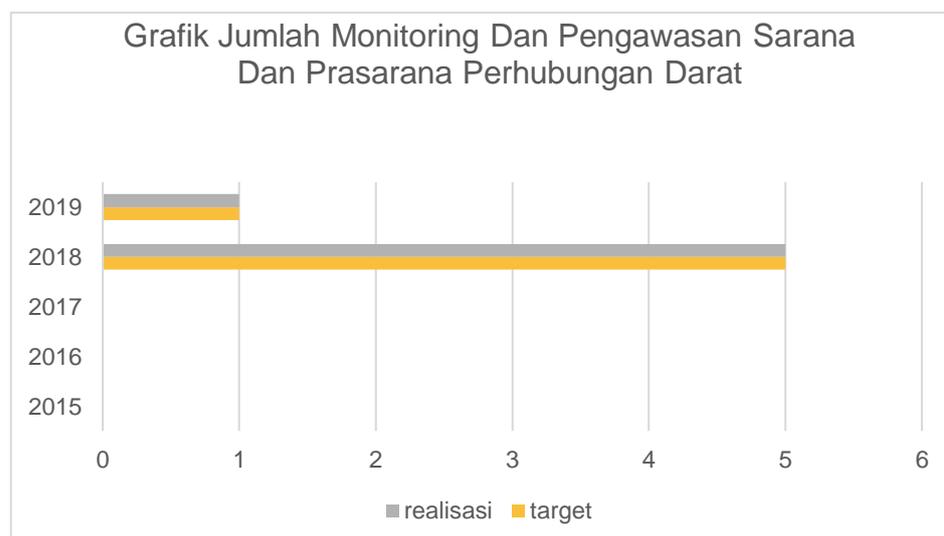
IK.8. Jumlah UPPKB Yang Dioperasionalkan

	2015	2016	2017	2018	2019
Target	-	-	-	5	10
Realisasi	-	-	-	5	10
Capaian	-	-	-	100%	100%



IK.9. Jumlah Monitoring Dan Pengawasan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Darat

	2015	2016	2017	2018	2019
Target	-	-	-	5	1
Realisasi	-	-	-	5	1
Capaian	-	-	-	100%	100%



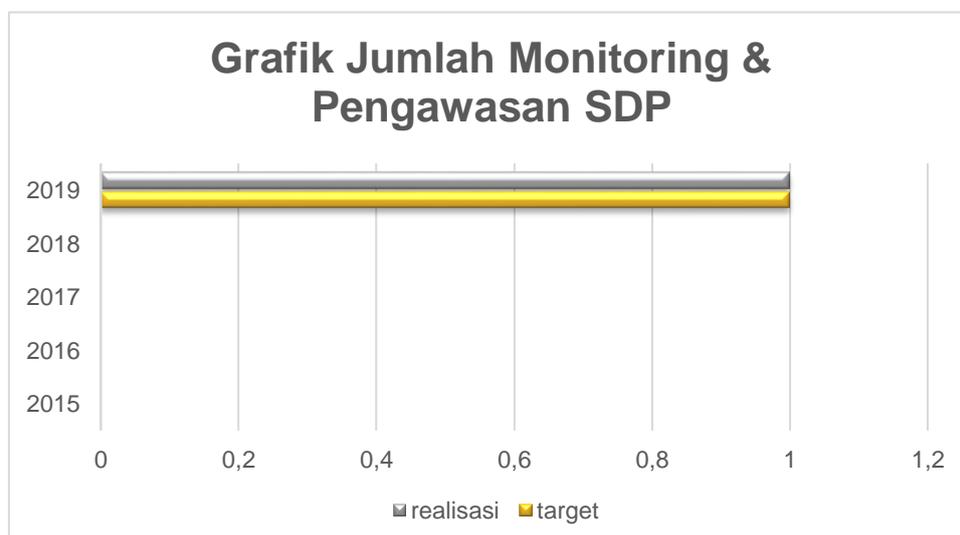
IK.10. Jumlah Monitoring Dan Pengawasan LLAJ

	2015	2016	2017	2018	2019
Target	-	-	-	58	1
Realisasi	-	-	-	58	1
Capaian	-	-	-	100%	100%



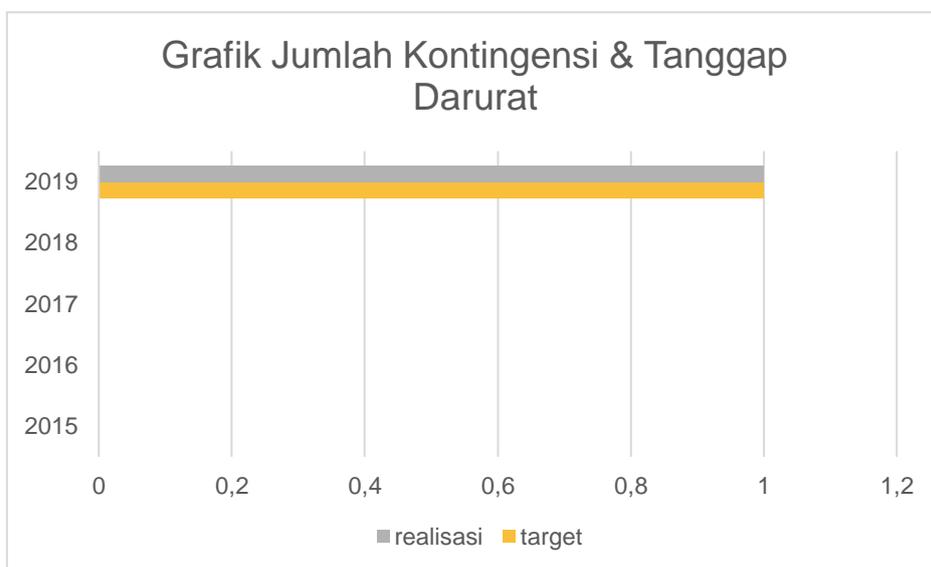
IK.11. Jumlah Monitoring Dan Pengawasan Sdp

	2015	2016	2017	2018	2019
Target	-	-	-	-	1
Realisasi	-	-	-	-	1
Capaian	-	-	-	100%	100%



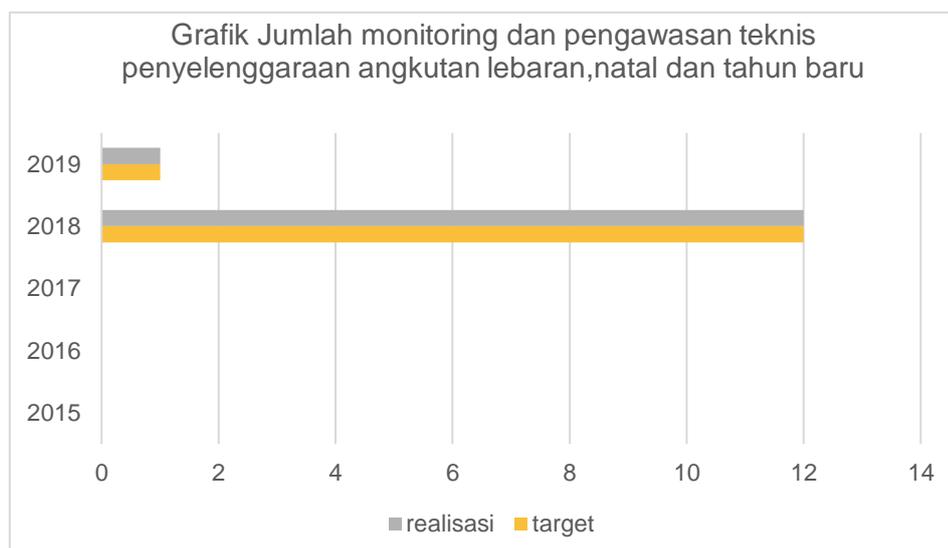
IK.12.Jumlah Kontingensi Bencana Dan Tanggap Darurat

	2015	2016	2017	2018	2019
Target	-	-	-	-	1
Realisasi	-	-	-	-	1
Capaian	-	-	-	100%	100%



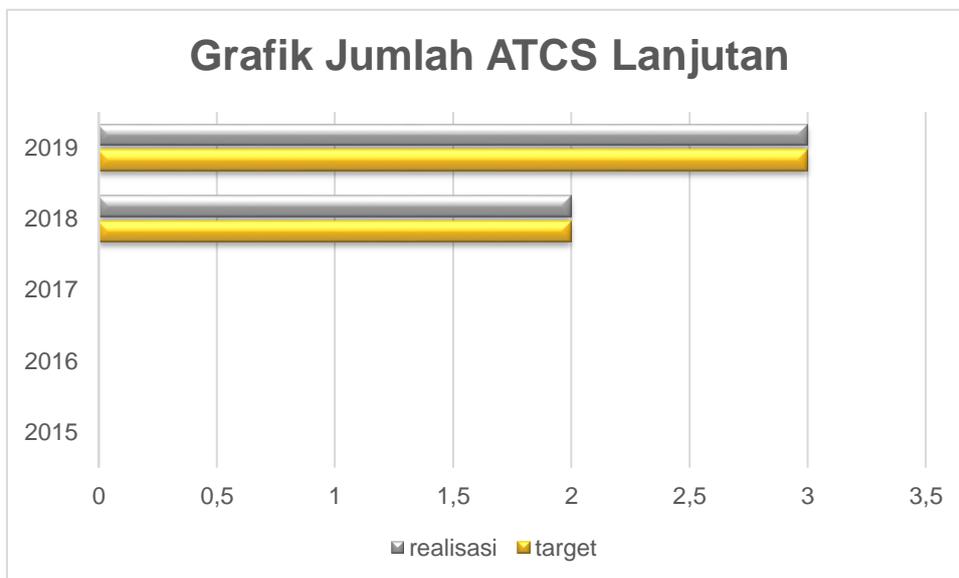
IK.13. Terlaksananya Monitoring Dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Angkutan Lebaran,Natal Dan Tahun Baru

	2015	2016	2017	2018	2019
Target	-	-	-	12	1
Realisasi	-	-	-	12	1
Capaian	-	-	-	100%	100%



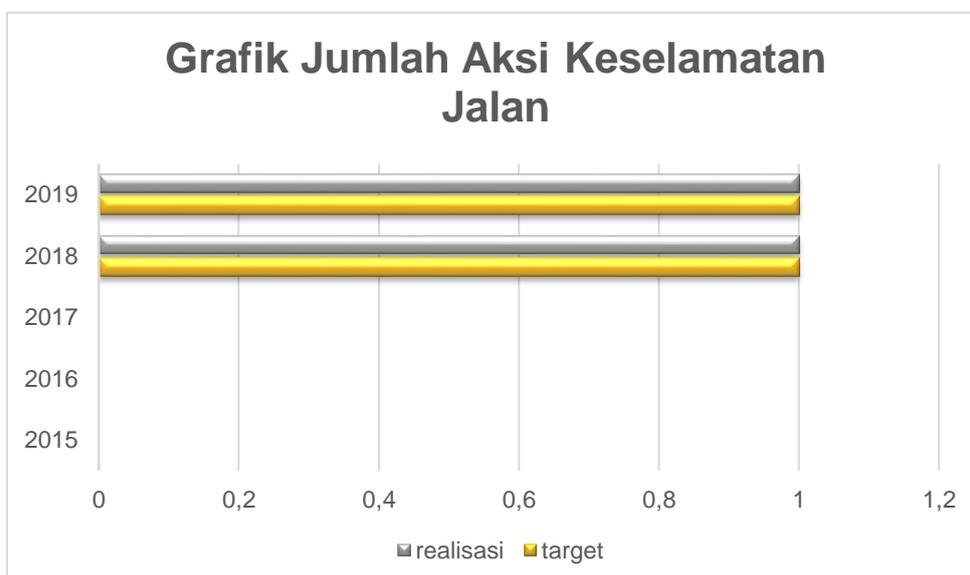
IK,14. Jumlah Atcs Lanjutan

	2015	2016	2017	2018	2019
Target	-	-	-	2	3
Realisasi	-	-	-	2	3
Capaian	-	-	-	100%	100%



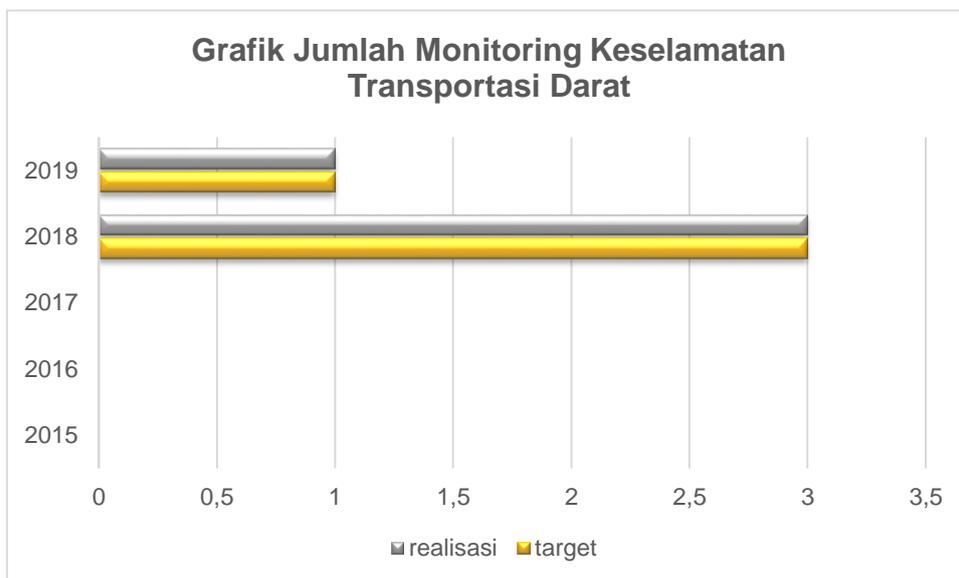
IK.15. Terlaksananya Aksi Keselamatan Jalan

	2015	2016	2017	2018	2019
Target	-	-	-	1	1
Realisasi	-	-	-	1	1
Capaian	-	-	-	100%	100%



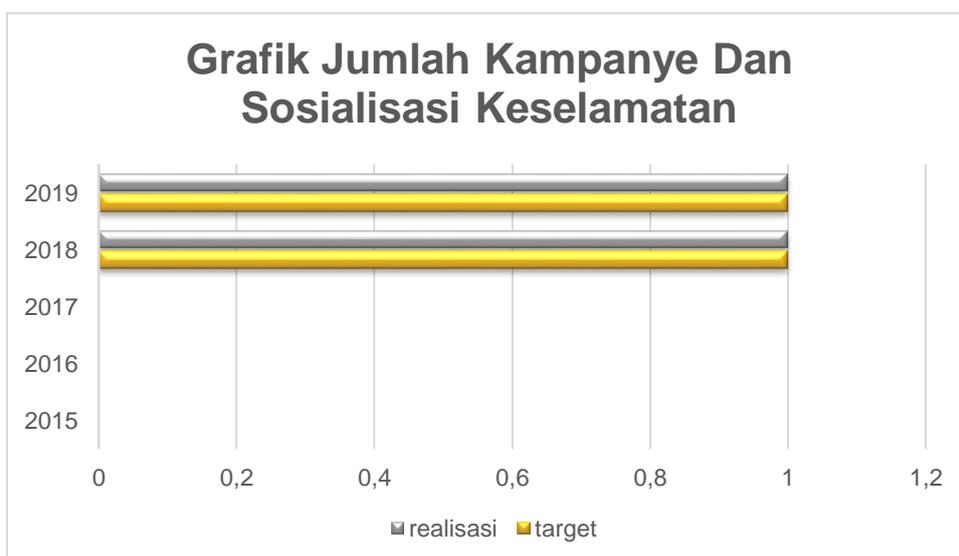
IK.16. Jumlah Monitoring Keselamatan Transportasi Darat

	2015	2016	2017	2018	2019
Target	-	-	-	3	1
Realisasi	-	-	-	3	1
Capaian	-	-	-	100%	100%



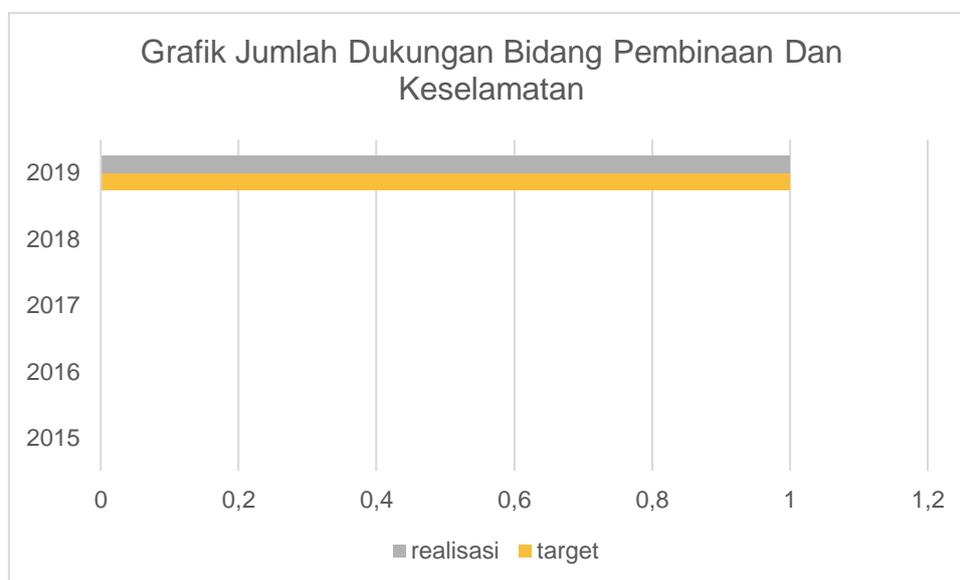
IK.17. Jumlah Kampanye Dan Sosialisasi Keselamatan

	2015	2016	2017	2018	2019
Target	-	-	-	1	1
Realisasi	-	-	-	1	1
Capaian	-	-	-	100%	100%



IK.18. Jumlah Dukungan Bidang Pembinaan Dan Keselamatan

	2015	2016	2017	2018	2019
Target	-	-	-	-	1
Realisasi	-	-	-	-	1
Capaian	-	-	-	100%	100%



III.3.3. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Dari sasaran strategis dua ini, terdapat tiga belas indikator kinerja dan keseluruhan target pada tahun 2019 tercapai 100%, hal ini dapat terjadi karena dukungan dari semua pihak yang telah ikut serta dalam peran aktif di instansi BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I.Y. Semangat yang tinggi para pegawai BPTD patut diapresiasi karena semua kegiatan terlaksana dengan baik, oleh karena itu untuk keberhasilan kegiatan, inovasi, kreatifitas tiap pegawai tiap instansi harus terus didukung dari semua aspek agar kedepannya tiap tahun harus lebih baik lagi dan ditingkatkan kinerja dari masing-masing pegawai.

III.4.1. PERBANDINGAN TARGET 2019 TERHADAP REALISASI 2019



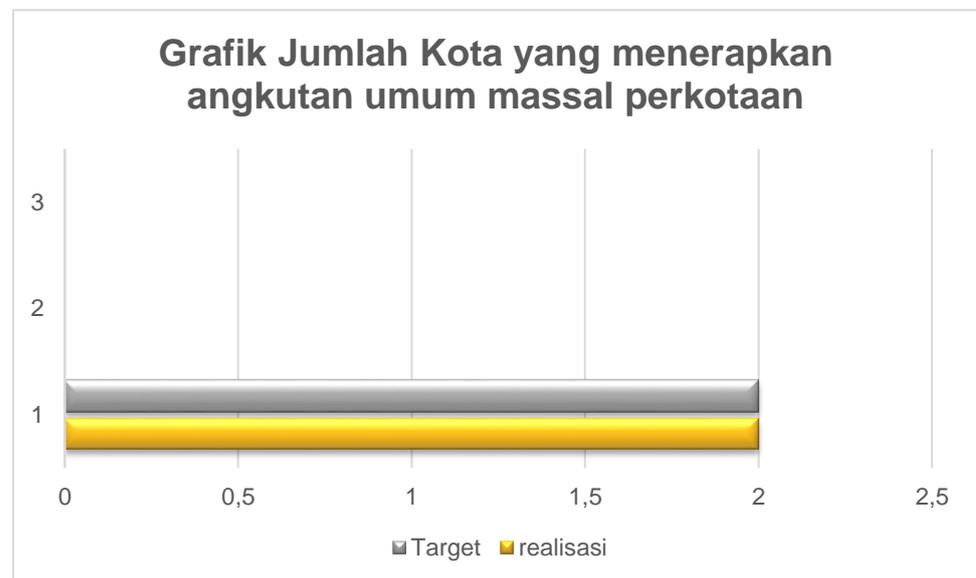
Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat

Pencapaian SS 3 diukur melalui Tiga Indikator Kinerja (IK) yaitu IK 19) Jumlah Kota yang menerapkan angkutan umum massal perkotaan, IK 20) Jumlah kota yang menerapkan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh Ibukota Provinsi/Kota Besar/Kota Metropolitan, IK 21) Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Kalibrasi alat uji kendaraan

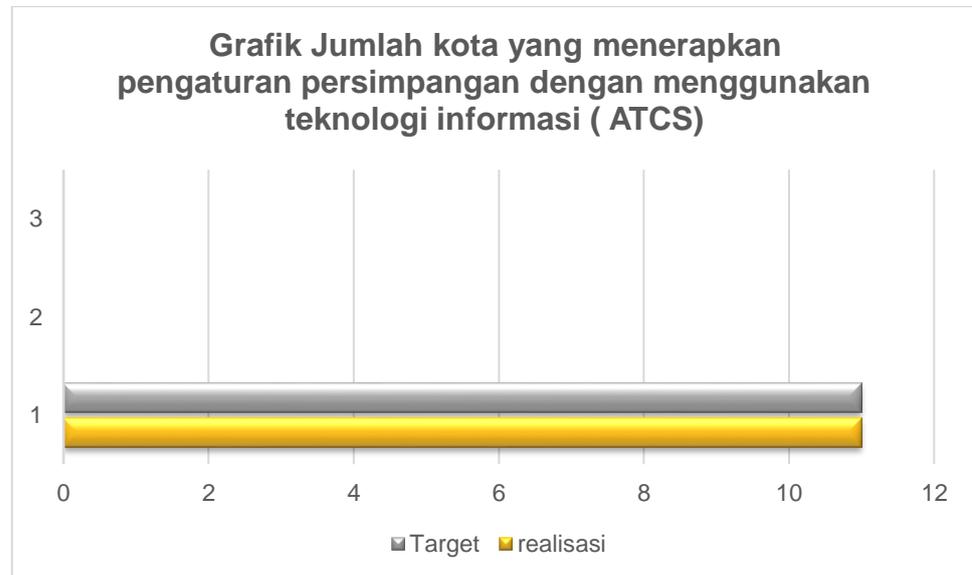
IK.19. Jumlah Kota Yang Menerapkan Angkutan Umum Massal Perkotaan

Berikut grafik Jumlah Kota yang menerapkan angkutan umum massal perkotaan pada tahun 2019 yaitu sebanyak 2 kota.



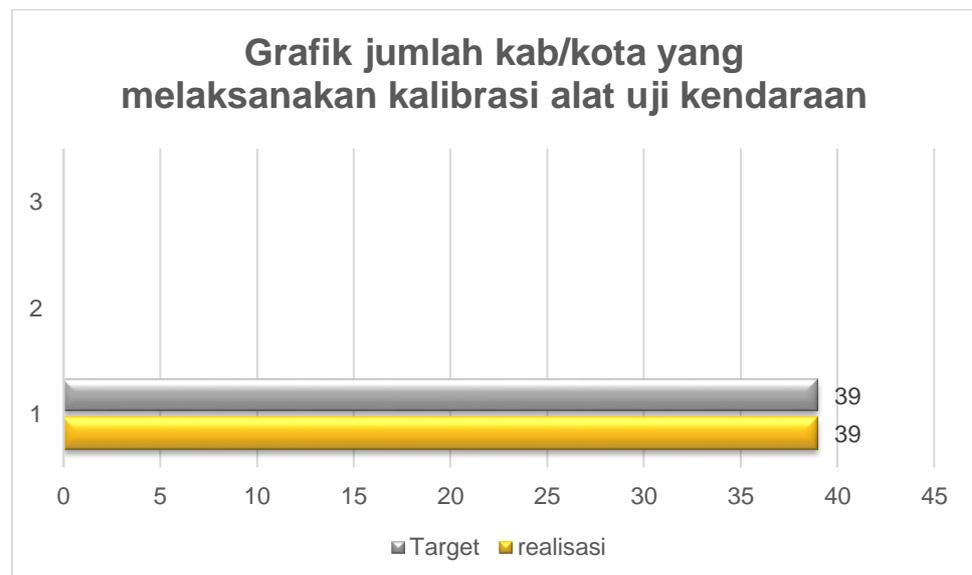
IK.20. Jumlah Kota Yang Menerapkan Pengaturan Persimpangan Dengan Menggunakan Teknologi Informasi (ATCS) Di Seluruh Ibukota Provinsi/Kota Besar/Kota Metropolitan

Capaian target pada penerapan pengaturan persimpangan dengan teknologi (ATCS), berjumlah 11 kota/kabupaten. Berikut grafiknya:



IK.21. Jumlah Kab/Kota Yang Melaksanakan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan

Berikut jumlah kab/kota yang melaksanakan kalibrasi alat uji kendaraan pada tahun 2019 sebanyak 39

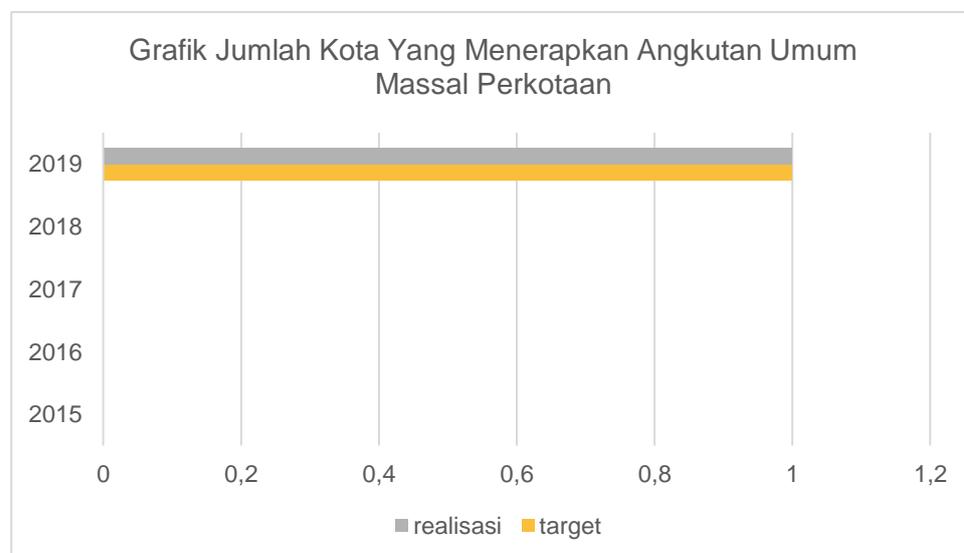


III.4.2. PERBANDINGAN TARGET TAHUN 2015-2019 TERHADAP REALISASI TAHUN 2015-2019

Pada pencapaian sasaran strategis tiga ada 3 indikator kinerja, berikut ditampilkan table dan grafik perbandingan target kinerja tahun 2015-2019 terhadap realisasi kinerja tahun 2015-2019.

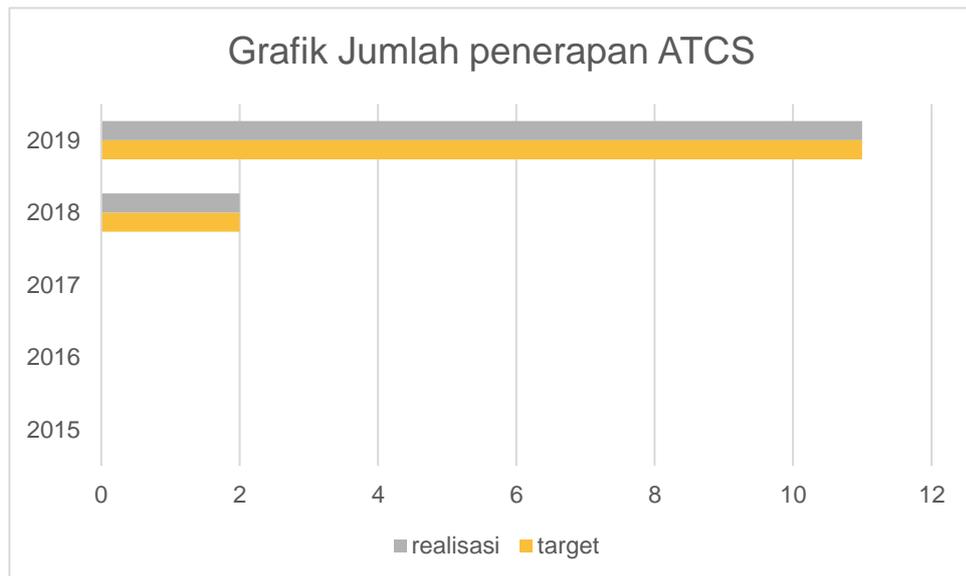
IK. 19. Jumlah Kota Yang Menerapkan Angkutan Umum Massal Perkotaan

	2015	2016	2017	2018	2019
Target	-	-	-		1
Realisasi	-	-	-		1
Capaian	-	-	-	100%	100%



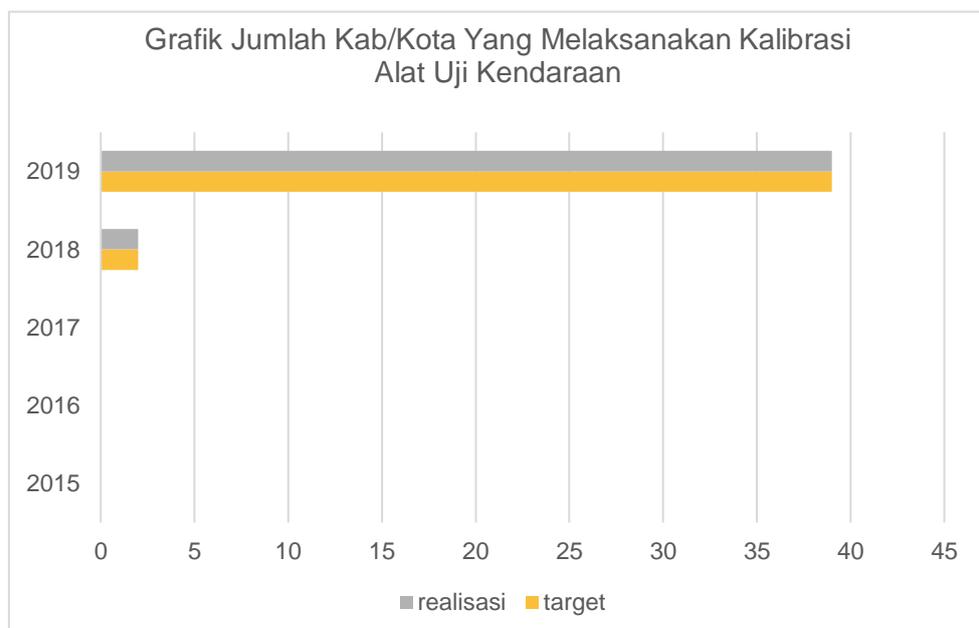
IK.20. Jumlah Kota Yang Menerapkan Pengaturan Persimpangan Dengan Menggunakan Teknologi Informasi (ATCS) Di Seluruh Ibukota Provinsi/Kota Besar/Kota Metropolitan

	2015	2016	2017	2018	2019
Target	-	-	-	2	11
Realisasi	-	-	-	2	11
Capaian	-	-	-	100%	100%



IK.21. Jumlah Kab/Kota Yang Melaksanakan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan

	2015	2016	2017	2018	2019
Target	-	-	-	2	39
Realisasi	-	-	-	2	39
Capaian	-	-	-	100%	100%



III.4.3. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Pada sasaran strategis tiga ini yang terdiri dari 3 indikator kinerja menghasilkan keberhasilan yang memuaskan dalam setiap kegiatan yang telah terlaksana. Adanya peningkatan kinerja dari tahun lalu, dengan harapan peningkatan kinerja tersebut dapat memotivasi lagi untuk tahun mendatang. Adakalanya perlu diperhatikan setiap kegiatan pelaksanaan monitoring agar menghasilkan sebuah database, dokumen, data informasi setiap bidang. Supaya mudah melaksanakan evaluasi kerja bagi tiap-tiap bidang di instansi BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta.

III.5.1. PERBANDINGAN TARGET 2019 DAN REALISASI TAHUN 2019



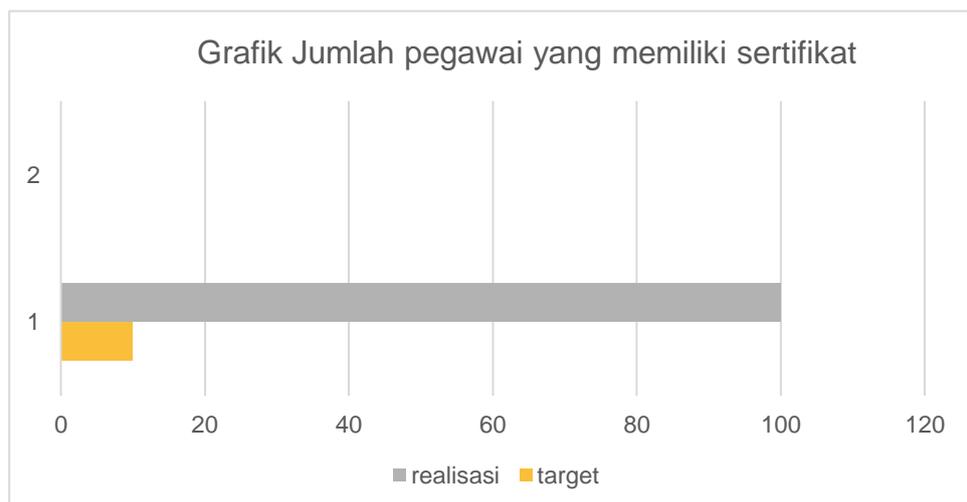
Sasaran Strategis 4

Meningkatkan Kualitas dan Kinerja ASN BPTD

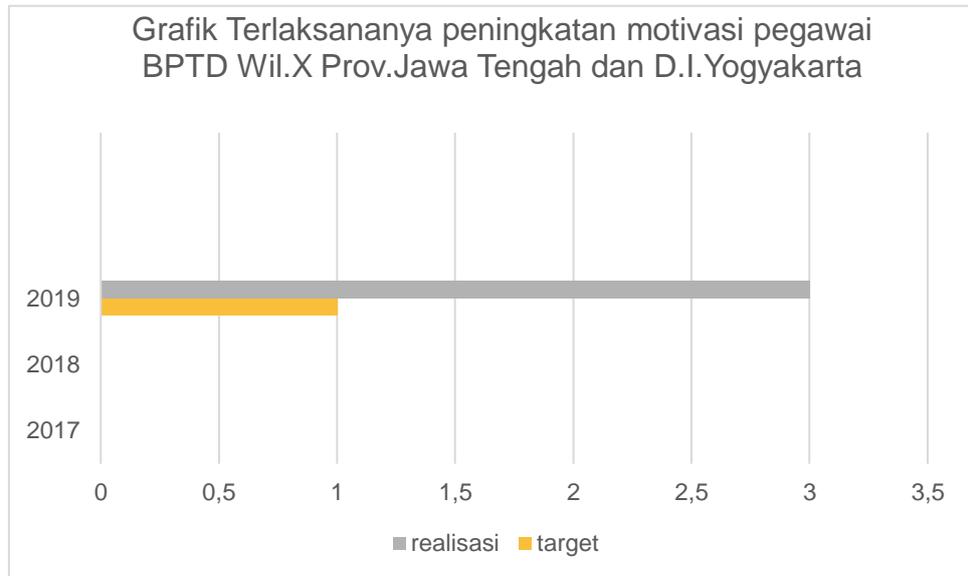
Pada sasaran strategis 4 ada tiga indicator kinerja yaitu, jumlah pegawai yang sudah memiliki sertifikat, terlaksananya peningkatan motivasi pegawai BPTD X Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta. Serta terlaksananya Bimbingan Teknis dan Sosialisasi BPTD.

Berikut grafik dari sasaran strategis 4 :

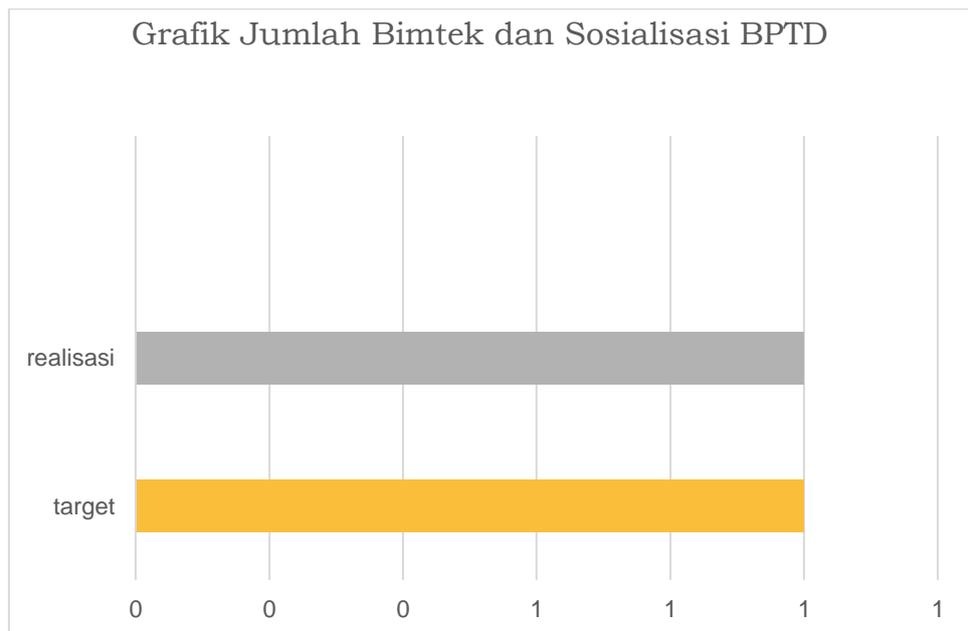
IK.22. Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat



IK.23. terlaksananya peningkatan motivasi pegawai BPTD X Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta



IK.24. Terlaksananya Bimtek Dan Sosialisasi Bptd



III.5.2. PERBANDINGAN TARGET 2015-2019 TERHADAP REALISASI 2015-2019

IK.22. Jumlah Pegawai Yang Memiliki Sertifikat

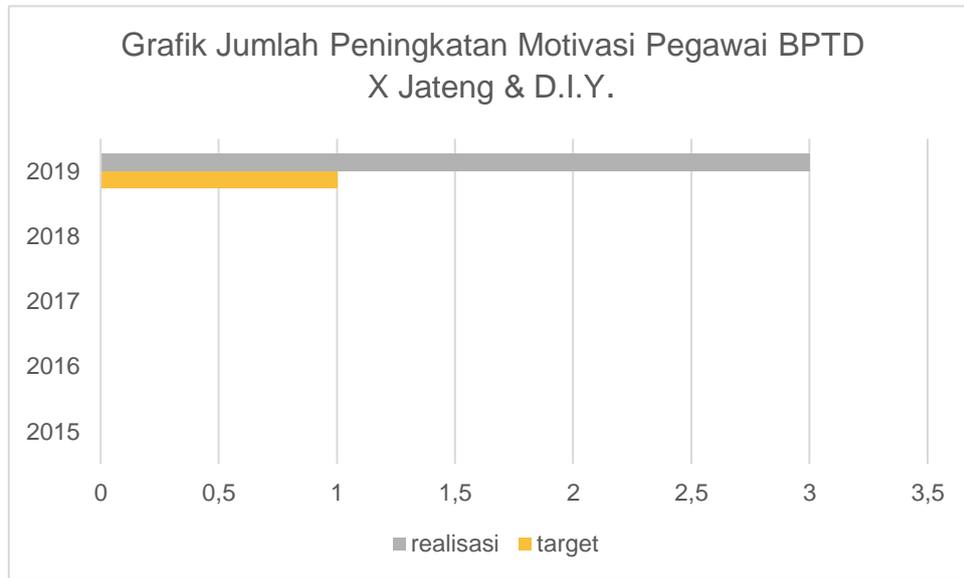
Berikut table dan grafik perbandingan antara target 2015-2019 terhadap realisasi 2015-2019 dalam indicator kinerja pegawai yang memiliki sertifikat

	2015	2016	2017	2018	2019
Target	-	-	-	5	10
Realisasi	-	-	-	5	100
Capaian	-	-	-	100%	100%



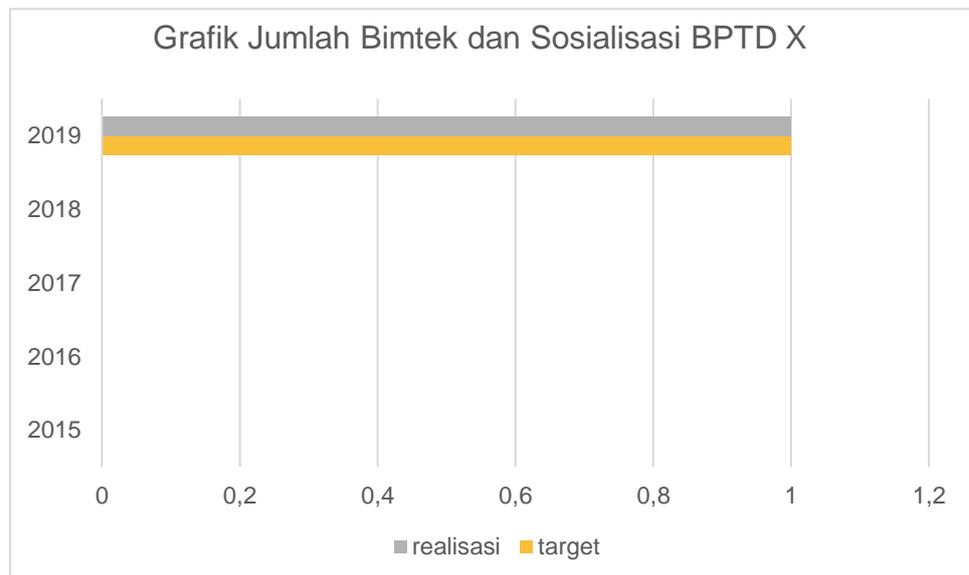
IK.23. Terlaksananya Peningkatan Motivasi Pegawai BPTD X Provinsi Jawa Tengah & D.I.Yogyakarta

	2015	2016	2017	2018	2019
Target	-	-	-	0	1
Realisasi	-	-	-	0	3
Capaian	-	-	-	-	100%



IK.24.Terlaksananya Bimtek Dan Sosialisasi Bptd

	2015	2016	2017	2018	2019
Target	-	-	-	0	1
Realisasi	-	-	-	0	1
Capaian	-	-	-	-	100%



III.5.3. ANALISIS PENYEBAB KBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Dalam sasaran strategis empat yang terdiri dari tiga indikator tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa, selama periode BPTD berdiri selalu ada peningkatan dalam setiap kinerja masing-masing pegawai. Keberhasilan akan tercapai jika kita sepenuh hati berusaha dan yakin. Dukungan serta motivasi dari pimpinan juga berpengaruh dalam setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan. Tahun mendatang tiap BPTD harus bias meningkatkan loyalitas, intelektualitas, kualitas diri dan bias membawa nama baik instansi.

III.6.1. PERBANDINGAN TARGET 2019 DAN REALISASI TAHUN 2019



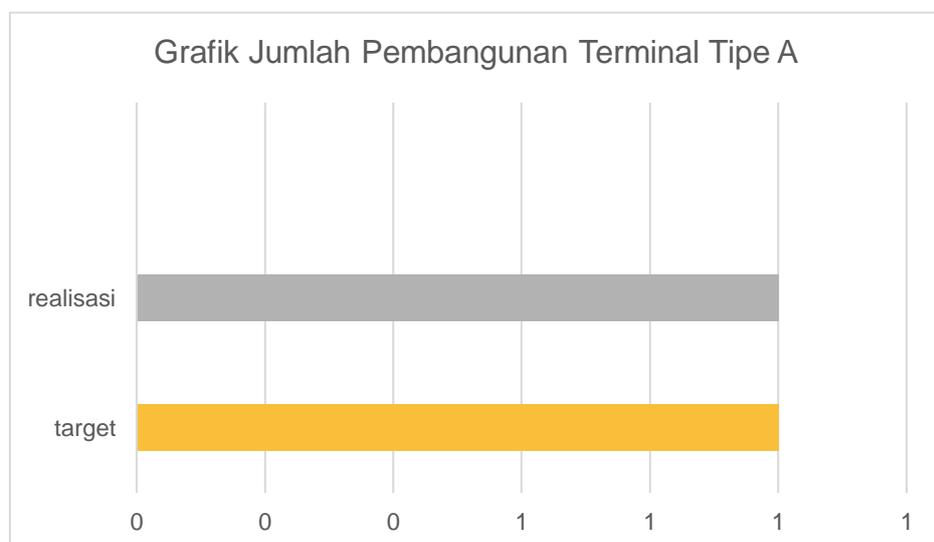
Sasaran Strategis 5

MENINGKATKAN KAPASITAS SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI DARAT

Dalam SS 5 ini terdapat Pencapaian melalui dua Indikator Kinerja (IK) yaitu IK 25 Jumlah pembangunan terminal, IK 26 Jumlah Rehabilitasi Terminal Tipe A di Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

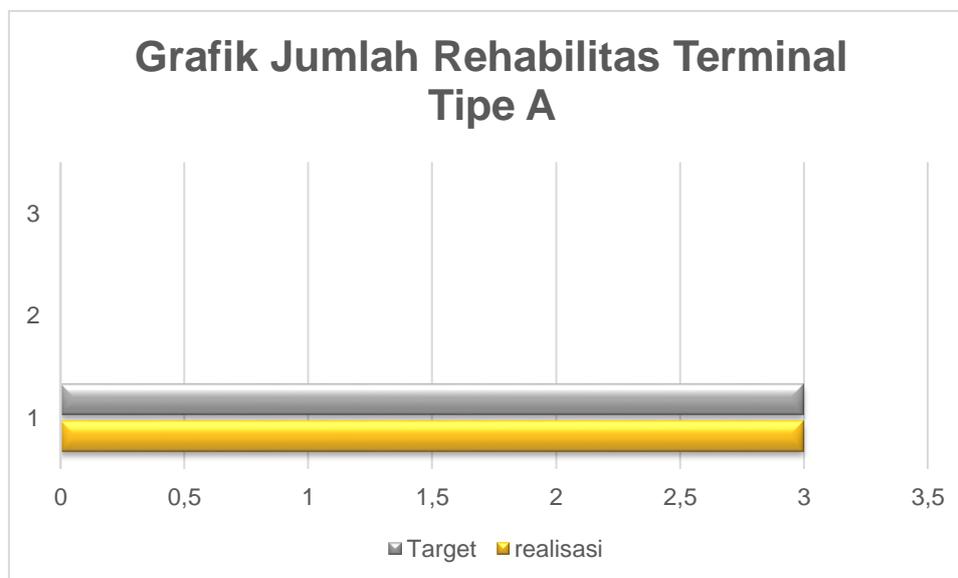
IK.25. Jumlah Pembangunan Terminal

Berikut Jumlah pembangunan terminal tipe A di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019 sebanyak 1 lokasi terminal.



IK.26. Jumlah Rehabilitasi Terminal

Berikut grafik tergambar dari jumlah rehabilitasi terminal tipe A di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) lokasi .

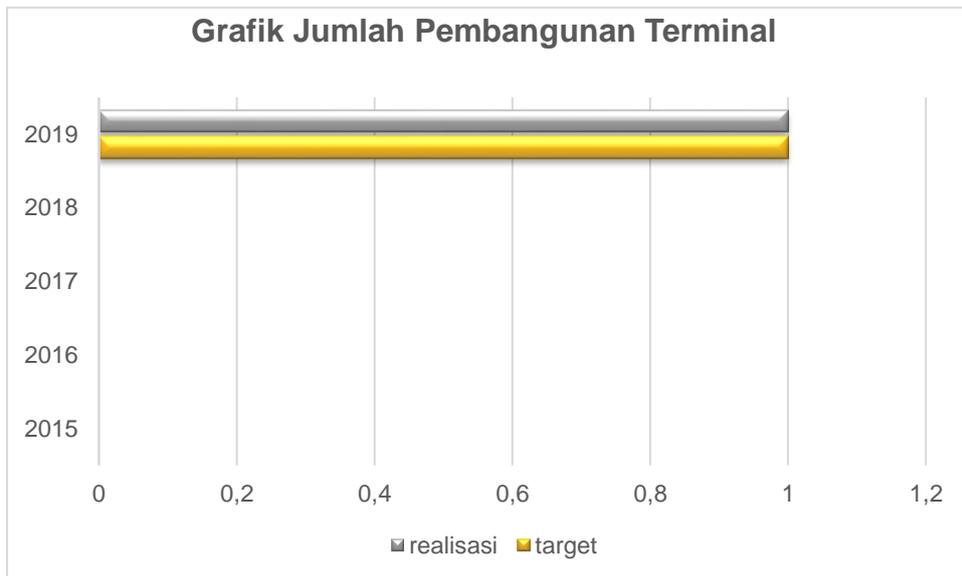


III.6.2. PERBANDINGAN TARGET TAHUN 2015-2019 TERHADAP REALISASI 2015-2019

Berikut table dan grafik perbandingan antara target dan realisasi selama periode 2015-2019 dalam SS 5 yang memiliki 2 Indikator Kinerja.

IK.25. Jumlah Pembangunan Terminal

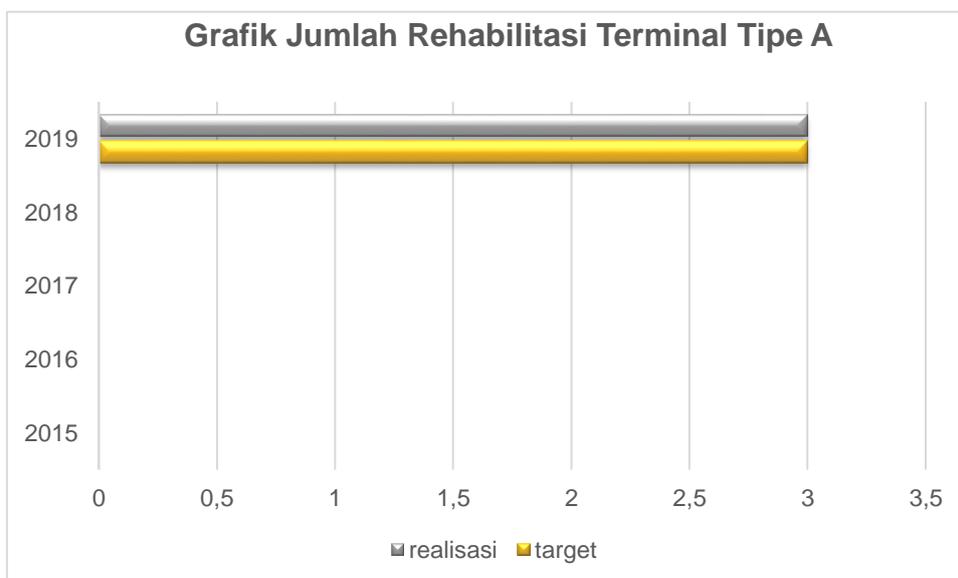
	2015	2016	2017	2018	2019
Target	-	-	-	0	1
Realisasi	-	-	-	0	1
Capaian	-	-	-	-	100%



IK.26. Jumlah Rehabilitasi Terminal Tipe A

Pada tahun 2019 terdapat 3 (tiga) lokasi rehabilitasi terminal tipe A di Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

	2015	2016	2017	2018	2019
Target	-	-	-	0	3
Realisasi	-	-	-	0	3
Capaian	-	-	-	-	100%



III.6.3. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Sasaran strategis lima yang berisi dua indikator kinerja ini memiliki keberhasilan yang cukup memuaskan, karena dari semua realisasi melebihi target, yang artinya Usaha untuk meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana perhubungan darat membuahkan hasil yang gemilang. Dengan terrealisasinya semua pencapaian kinerja BPTD X Provinsi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan memudahkan pergerakan manusia dalam mencapai tujuan. Dengan terpenuhinya semua kapasitas sarana dan prasarana di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta maka semua kemudahan aksesibilitas transportasi akan berjalan lancar. Namun dalam hal ini pemerintah harus tetap melakukan pengawasan dan m



Sasaran Strategis 6

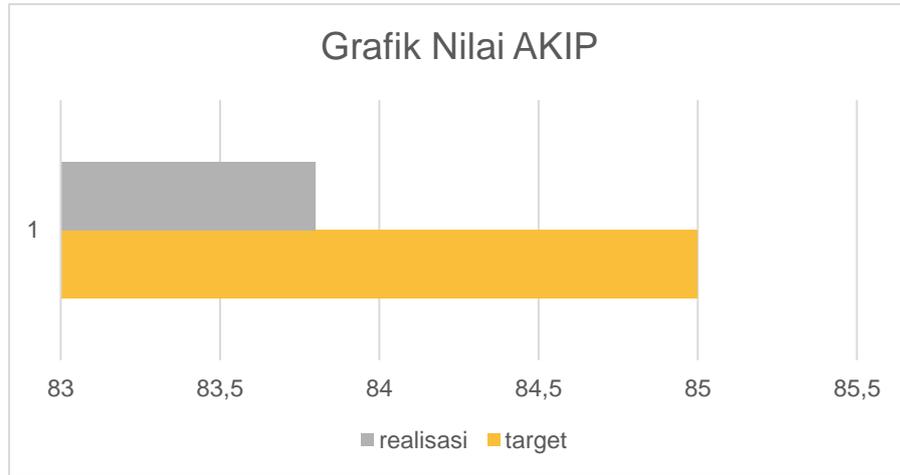
Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di BPTD

III.7.1. PERBANDINGAN TARGET 2019 DAN REALISASI 2019

Dalam sasaran strategis enam terdapat tujuh indikator kinerja yang terdiri dari, Nilai AKIP, Tingkat penyerapan anggaran, nilai asset yang diinventariskan, penyelenggaraan administrasi perkantoran, penyelenggaraan belanja pegawai termasuk tunjangan, tersusunnya bahan RKA, Tersusunnya LAKIP,LAPTAH dan penetapan kinerja. Berikut grafik dari masing-masing indikator kinerja pada SS enam tahun 2019onitoning.

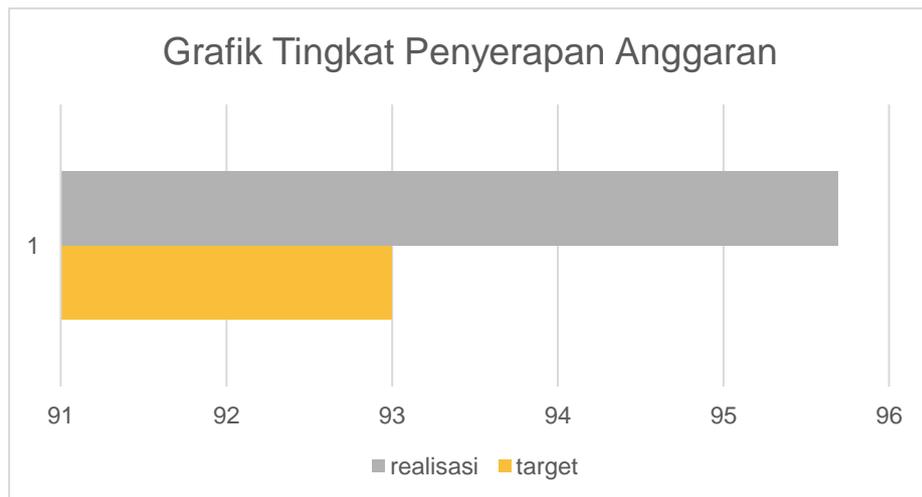
IK.27 NILAI AKIP

Capaian nilai AKIP pada tahun 2019 sebesar 83,8%



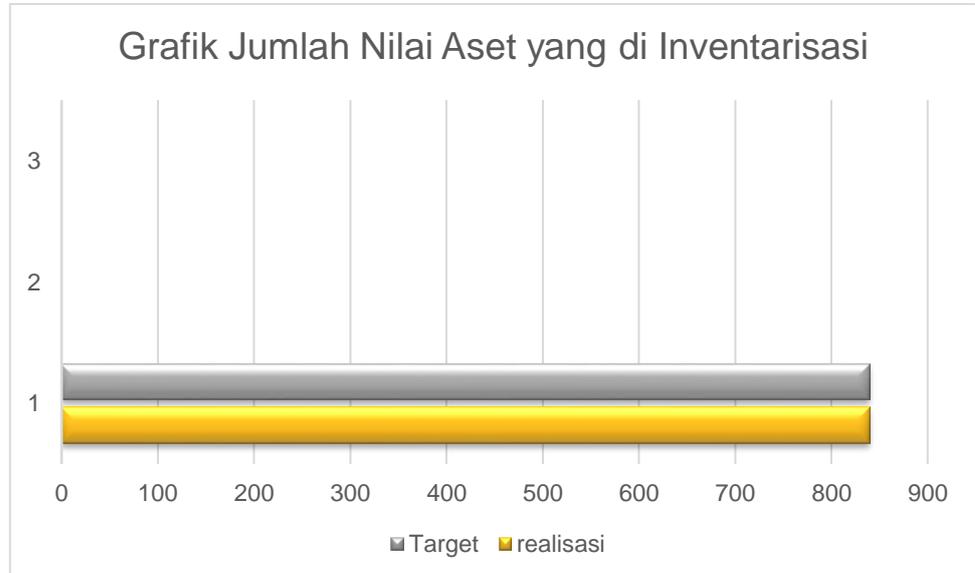
IK.28. Tingkat Penyerapan Anggaran

Berikut grafik tingkat penyerapan anggaran tahun 2019 pada BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 95,69%.



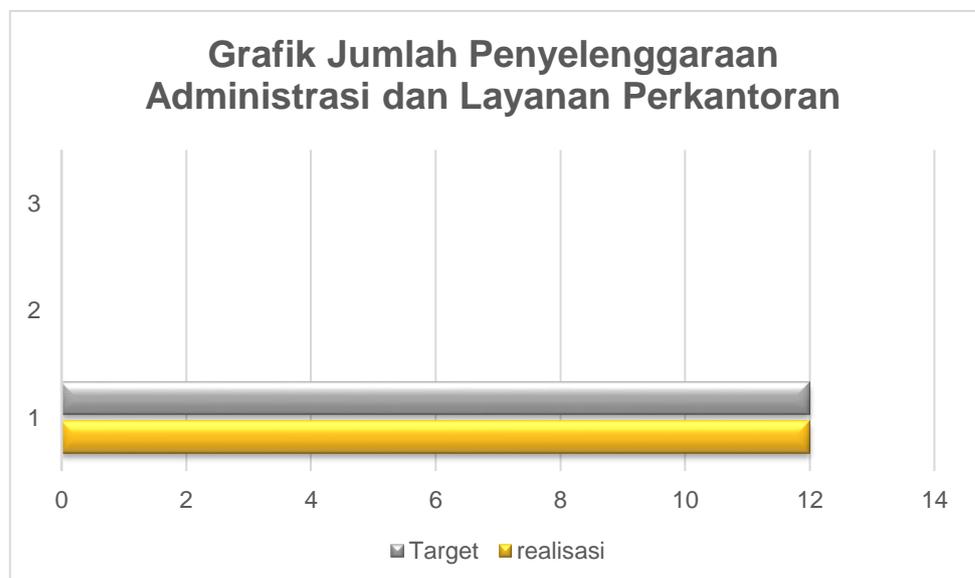
IK 29 Nilai Aset yang di Inventarisasi

Nilai aset yang telah diinventarisasi pada tahun 2019 sebanyak 840M . Berikut grafik nilai aset yang telah di inventarisasi



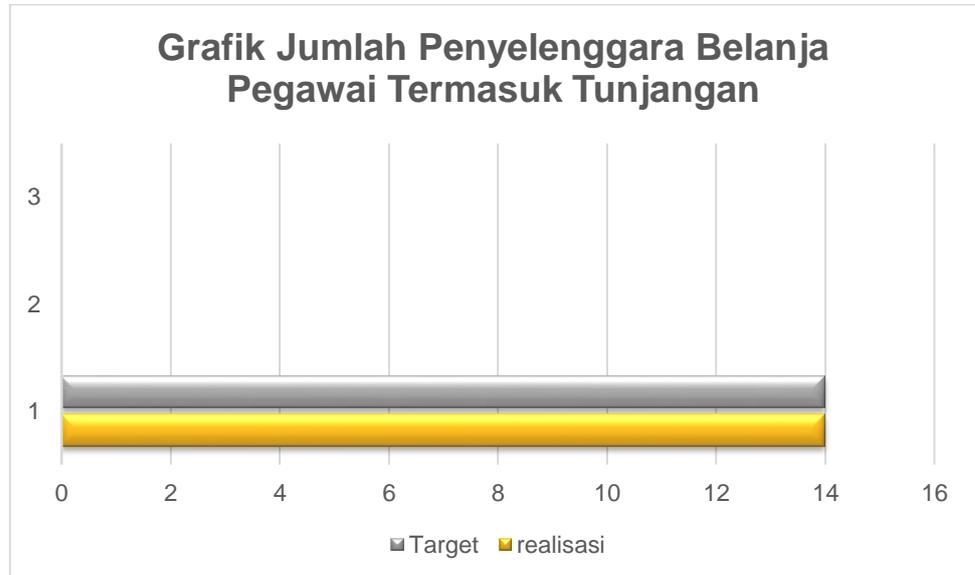
IK 30 Penyelenggaraan Administrasi dan Layanan Perkantoran

Berikut grafik jumlah Penyelenggaraan Administrasi dan Layanan Perkantoran pada tahun 2019 mencapai target yaitu selama 12 bulan.

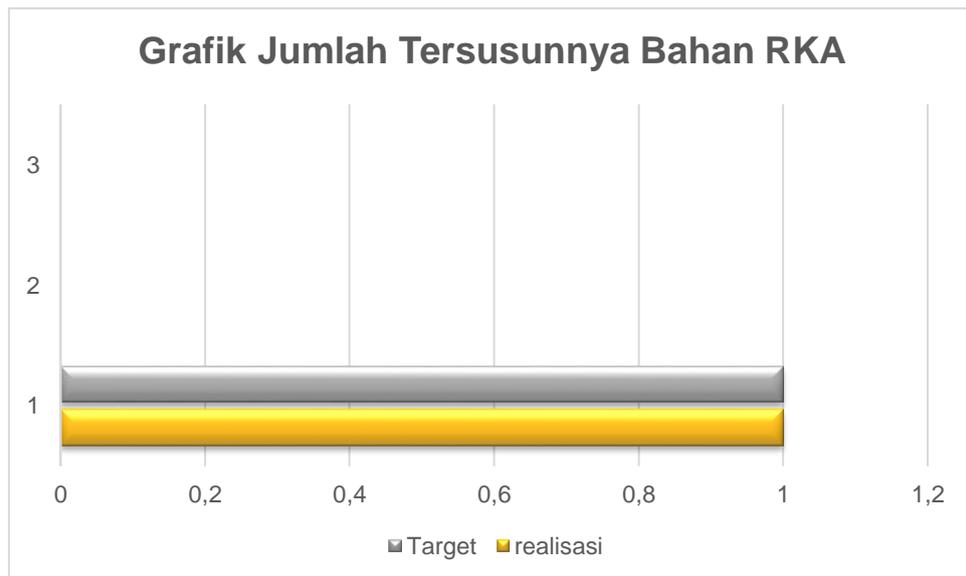


IK 31 Penyelenggara Belanja Pegawai Termasuk Tunjangan

Berikut realiasi dari penyelenggaraan belanja pegawai dan tunjangan selama tahun 2019 mencapai target sebanyak 14 bulan. Berikut grafik penyelenggaraan belanja pegawai dan termasuk tunjangan.



IK.32.Tersusunnya Bahan RKA



IK.33. Tersusunnya Lakip,Laptah, Perjanjian Kinerja



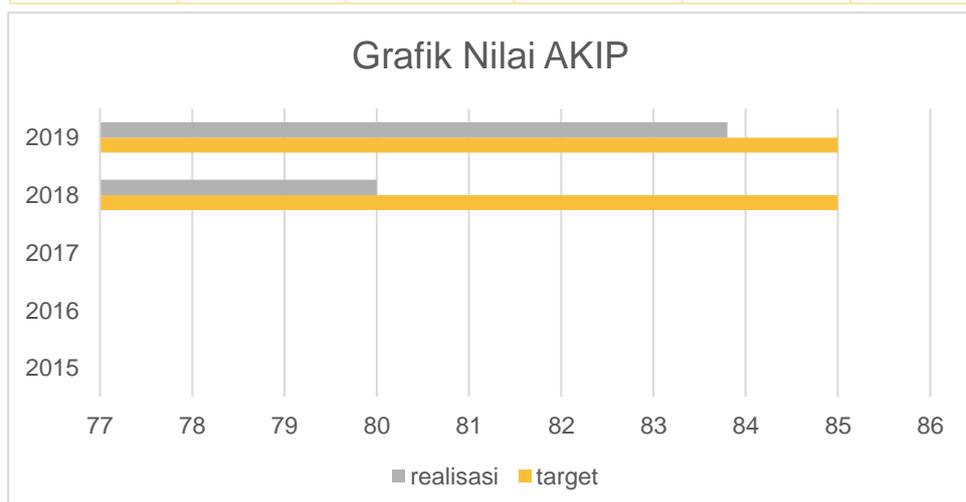
III.7.2.PERBANDINGAN TARGET TAHUN 2015-2019 TERHADAP REALISASI TAHUN 2015-2019

Berikut table dan grafik perbandingan target 2015-2019 terhadap realisasi Tahun 2015-2019 pada sasaran strategis 6 yang terdiri dari 7 indikator kinerja.

IK.27. NILAI AKIP

Nilai AKIP pada tahun 2019 ini mencapai angka 85

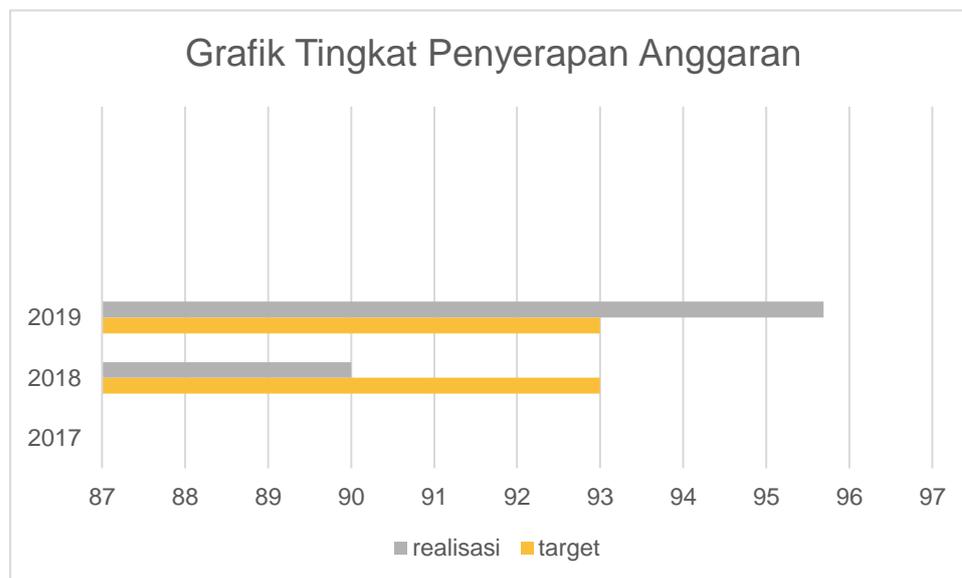
	2015	2016	2017	2018	2019
Target	-	-	-	85	85
Realisasi	-	-	-	80	83,8
Capaian	-	-	-	80%	98,59%



IK.28. Tingkat Penyerapan Anggaran

Pada tahun 2019 tingkat penyerapan anggaran mencapai 93%.

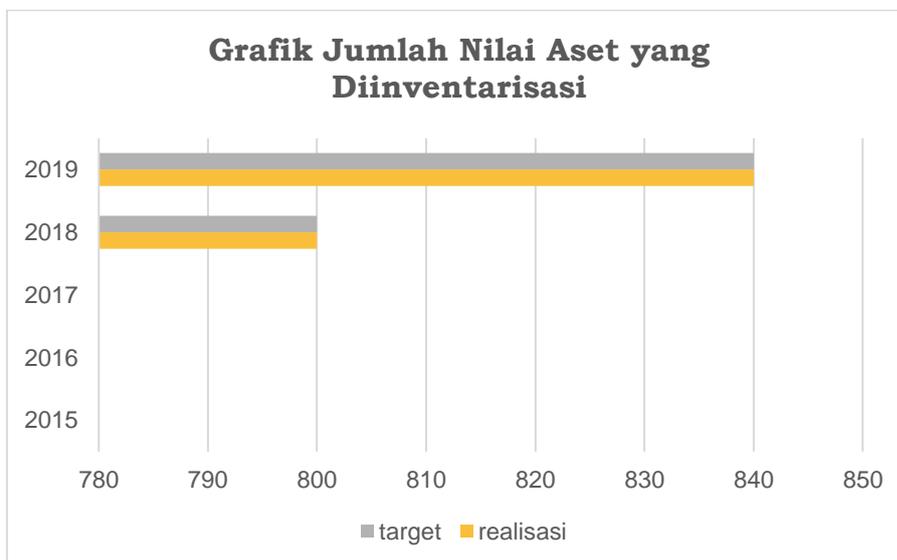
	2015	2016	2017	2018	2019
Target	-	-	-	93%	93%
Realisasi	-	-	-	90%	95,69%
Capaian	-	-	-	90%	102,89%



IK.29. Nilai Aset yang di Inventarisasi

Capaian jumlah nilai aset yang di inventarisasi tahun 2019 sebanyak 840M

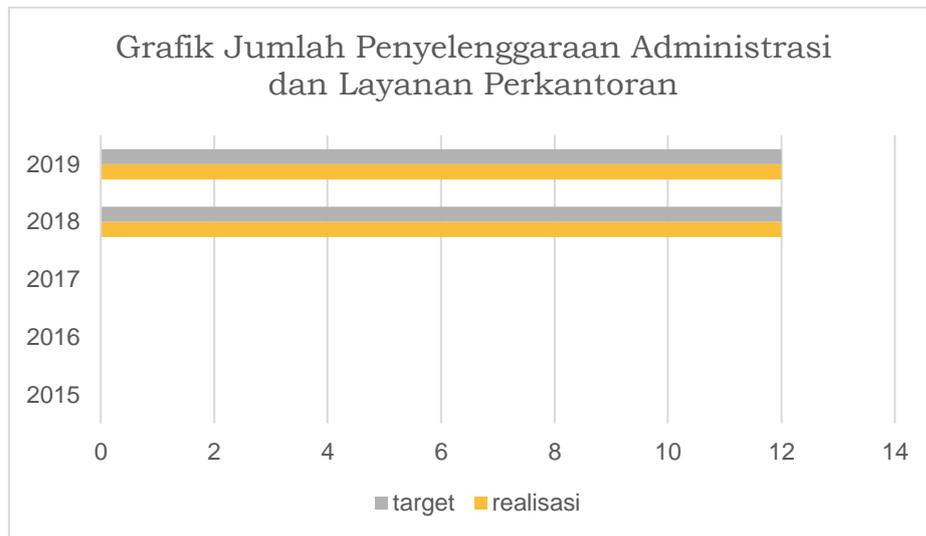
	2015	2016	2017	2018	2019
Target	-	-	-	800	840
Realisasi	-	-	-	800	840
Capaian	-	-	-	100%	100%



IK.30. Penyelenggaraan Administrasi Dan Layanan Perkantoran

Capaian jumlah penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran pada tahun 2019 sebanyak 12 bulan.

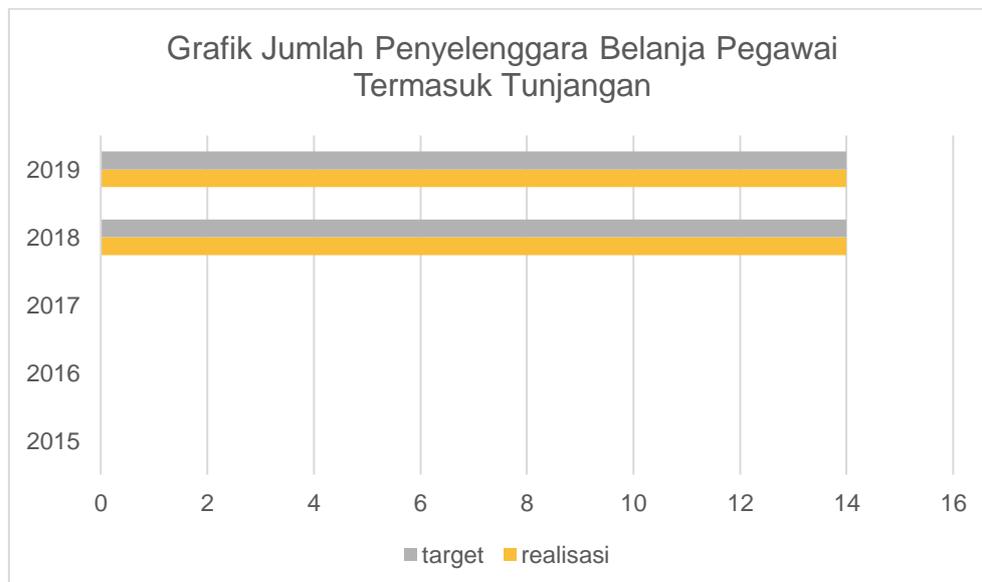
	2015	2016	2017	2018	2019
Target	-	-	-	12	12
Realisasi	-	-	-	12	12
Capaian	-	-	-	100%	100%



IK.31. Penyelenggara Belanja Pegawai Termasuk Tunjangan

Capaian jumlah penyelenggaraan belanja pegawai termasuk tunjangan pada tahun 2019 sebesar 14 bulan target tercapai 100%

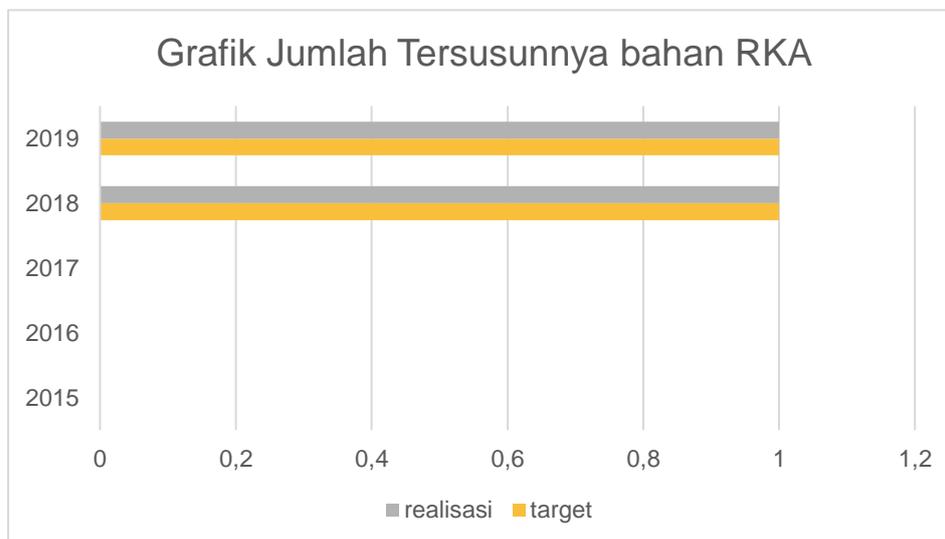
	2015	2016	2017	2018	2019
Target	-	-	-	14	14
Realisasi	-	-	-	14	14
Capaian	-	-	-	100%	100%



IK.32. Tersusun Bahan RKA

Capaian jumlah tersusunnya bahan RKA tahun 2019 sebesar 1 laporan lengkap tercapai 100% target dan realisasinya.

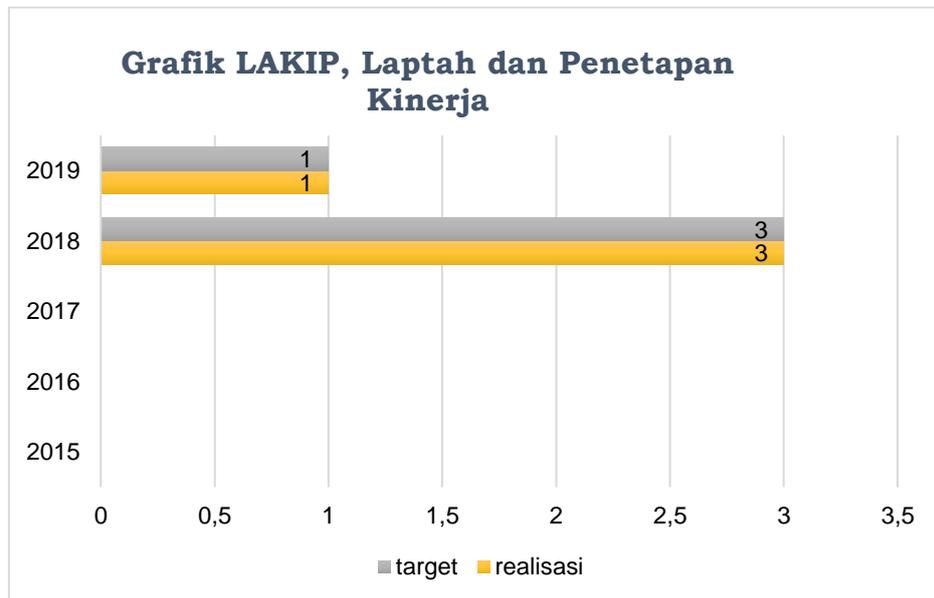
	2015	2016	2017	2018	2019
Target	-	-	-	1	1
Realisasi	-	-	-	1	1
Capaian	-	-	-	100%	100%



IK.33. Tersusun LAKIP, LAPTAH Dan Penetapan Kinerja

Capaian jumlah tersusunnya LAKIP, Laptah dan Penetapan Kinerja tahun 2019 sebesar 1 laporan lengkap yang sudah terdiri dari LAKIP, Laptah dan Pe tercapai 100% target dan realisasinya.

	2015	2016	2017	2018	2019
Target	-	-	-	3	1
Realisasi	-	-	-	3	1
Capaian	-	-	-	100%	100%



III.7.3. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan

Akuntabilitas keuangan menggambarkan anggaran yang disediakan untuk Indikator Kinerja Utama dan realisasi penggunaan anggaran tersebut. Secara umum realisasi anggaran yang rendah dari alokasi atau persentase pencapaian rencana tingkat capaian lebih besar dari 100% menggambarkan bahwa anggaran telah digunakan secara efisien. Namun hal ini berlaku jika realisasi keluaran (output) dapat tercapai sesuai target

III.8.1. ANALISIS SUMBER EFISIENSI SUMBER DAYA

Analisis Efisiensi Sumber Daya kami sajikan dalam Tabel berikut :

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Posisi 31 DESEMBER 2019			Prognosa s.d Des 2019
			Keuangan	%	% Fisik	
1	Belanja Pegawai	82.023.995.000	77.120.764.233	94,02%	94,40	77.120.764.233
2	Belanja Barang	76.204.187.000	72.289.630.306	94,86%	94,86	72.289.630.306
3	Belanja Modal	51.384.731.000	51.176.306.576	99,59%	99,59	51.176.306.576
TOTAL		209.612.913.000	200.586.701.115	95,69%		200.586.701.115

III.8.2. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan menggambarkan anggaran yang disediakan untuk Indikator Kinerja Utama dan realisasi penggunaan anggaran tersebut. Secara umum realisasi anggaran yang rendah dari alokasi atau persentase pencapaian rencana tingkat capaian lebih besar dari 100% menggambarkan bahwa anggaran telah digunakan secara efisien. Namun hal ini berlaku jika realisasi keluaran (output) dapat tercapai sesuai target.

III.8.3. Alokasi Total Anggaran Tahun 2019

Alokasi Anggaran Tahun 2019

a. Pagu Anggaran

1) Pagu Awal DIPA TA. 2019 sebesar **Rp.207.714.345.000**

Dengan rincian sebagai berikut:

▪ Rincian per Sumber Dana:

RM		R p.	197.790.725.000	-
PNBP		R p.	9.923.620.000	-
PLN		R p.	0	-

▪ Rincian per Jenis Belanja :

Belanja Pegawai	Rp.	83.105.734.000	-
Belanja Barang	Rp.	66.424.599.000	-
Belanja Modal	Rp.	58.184.012.000	-

III.8.4 Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

Dana tidak terserap oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 9.026.211.885, Dengan Rincian Sebagai Berikut:

1. Sisa belanja pegawai sebesar Rp.4.903.230.767
2. Sisa belanja barang Rp.3.914.556.694
3. Sisa belanja modal Rp.208.424.424

III.8.5 Hambatan dan Kendala

Beberapa Hambatan/Kendala Masih Rendahnya Realisasi Daya Serap Anggaran Antara Lain:

1. Sisa belanja pegawai sebesar Rp.4.903.230.767 di karenakan banyak pegawai yang pensiun dan meninggal dan uang lembur pegawai tidak terrealisasikan
2. Sisa belanja barang Rp.3.914.556.694 dikarenakan belanja modal yang masuk ke akun belanja barang dan sisa operasional terminal UPPKB dan BPTD
3. Sisa belanja modal Rp.208.424.424 berupa nilai kontraktual.



BAB 4 PENUTUP

IV. Kesimpulan dan Saran

Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat penilai kinerja serta alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

